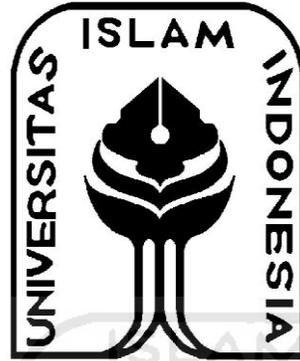


Skripsi

**STUDI KRITIS ATAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:  
Relasi Kuasa dalam Jejaring Pendanaan dan Program LSM di Yogyakarta**



المعزة الإسلامية  
الاستاذة الأستاذة

Disusun oleh:

**Dendy H. Nanda**

07331104

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal.....

Dosen pembimbing skripsi

**Muzavin Nazaruddin, S. Sos**

**NIDN 0516087901**

**Skripsi**

**STUDI KRITIS ATAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:  
Relasi Kuasa dalam Jejaring Pendanaan dan Program LSM di Yogyakarta**

Disusun oleh

**Dendy H. Nanda**

**07331104**

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal.....

Dewan penguji :

1. Ketua :Anang Hermawan, S. Sos, M.A  
IDN 0506067702 (.....)
2. Anggota :Muzayin Nazaruddin, S. Sos  
NIDN 0516087901 (.....)
3. Anggota :Fajar Junaedi S. Sos, M.Si  
NIDN 0520057901 (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Indonesia

**Anang Hermawan S. Sos, M. A**  
**NIDN0506067702**

**Motto:**

Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian kemenangan yang nyata  
**(QS, Al-fath)**

Bukan aku cerdas hanya saja aku lebih tekun. Siapapun yang belum pernah  
melakukan dan membuat kekeliruan, tidak akan menemukan sesuatu yang baru **(Albert  
Einstein)**

Kita tak pernah terlalu muda untuk mulai berfikir mendalam, dan tak pernah terlalu tua untuk  
mengakhirinya. Sebab tak pernah bisa dikatakan seseorang itu muda atau terlalu tua untuk  
menekuni kesehatan hidup **(Fa'uz Noor)**



## Halaman Persembahan

Untuk Pa dan Ma di Kampung :

seluruh cinta dan hormatku, aku persembahkan. Kalian berdua adalah alasan mengapa aku tetap semangat dan kuat dalam mengapai cita-citaku.



## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Telah banyak rintangan serta kejenuhan yang penulis lalui dalam pengerjaan penelitian ini, tapi penulis yakin hanya dengan kembali dan bersimpuh dihadapan Mu lah penulis bisa bangkit untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Salawat dan salam penulis panjatkan pada Muhammad Rasulullah, yang telah menuntun umatnya kembali kejalan-Nya.

Penelitian ini mengambil topik studi kritis atas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setelah belajar selama kurang lebih empat tahun di Prodi Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) konsentrasi Public Relations, penulis menyadari ada sedikit kejanggalan yang selalu membuat penulis bertanya apakah benar bahwa teori CSR yang selama ini penulis pelajari murni merupakan tindakan amal dan kebaikan hati dari perusahaan. Atau jangan-jangan ada kepentingan di dalam praktek CSR yang digadagadag oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Untuk itu fokus penelitian ini terkonsentrasi pada relasi kuasa dalam jejaring pendanaan dan program NGO di Yogyakarta.

Tentu dalam proses penelitian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu. Dari itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Anang Hermawan S. Sos, M.A, selaku ketua Prodi Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
2. Muzayin Nazaruddin S. Sos, selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapat selama bimbingan dan konsultasi skripsi ini. Walau cukup melelahkan dan sedikit pusing tapi penulis bangga dengan hasil maksimal skripsi ini.
3. Para narasumber penelitian ini: Mas Budi Hermanto (Direktur Combine), Mas Zaki Habibi (mantan pegiat LSM sekaligus dosen Prodi Komunikasi UII), Pak Adink (mantan pegiat LSM dan dosen Prodi Komunikasi UII), Mas Ibad (petinggi INFEST), Ibu Siti Roswati Handayani (Direktur Rifka Annisa), Mas Zamzam (petinggi Kampung Halaman). Mas Kurniawan (Direktur Rumah Sinema), Mas Momon (pegiat Diandesa), Mas Bambang Murdianto (Petinggi Aliansi Jurnalis Indonesia Yogyakarta), Mas Wahyu (Direktur Indonesian

Court Monitoring), Mas Didin Suhadi (petinggi Combine), Mas Rosi (pegiat Combine). Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, tanpa informasi dan data yang kalian berikan niscaya penelitian ini bisa selesai.

4. Sahabat penulis Cak Alfi, terima kasih banyak atas dukungan moral yang tiada hentinya serta diskusi ringan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khusus untuk Gus Ahmad, kita andai El Real dan El Barca yang selalu ingin memuncaki klasemen .Motivasi untuk selalu menang, menang dan menang menjadikan kita jalan beriring.
5. “dia”, walau takut, cemas, bingung, rindu, marah, tapi sejenak waktu bersamamu menjadikan aku ada. biaralah waktu dan “Dia” yang menjawab semua pertanyaan kita.
6. Mas Ridho dan Mbak Fiona yang menjadi teman *magic* penulis. Terima kasih atas diskusi dan dukungan spritualnya.
7. Sahabat-sahabat terbaik aku: Bahrul Ulum, Aditya Suganda, mbah Noveri, Anggi, Ikkal, Ifran, Lutfi, Wisnu, Pur, Cipto, Bob, Pay, bahagia rasanya bisa berjumpa makhluk seperti kalian. Ayo semangat !!! jangan sampai ada yang degradasi.
8. Staf Prodi Komunikasi: Mas Zarkoni, Mas Zaldi, Mbak Maya, Mbak Nyit-Nyit. Terima kasih atas informasi akademik dan bantuan-bantuan lainnya.
9. Teman-teman dan sahabat lain yang tak bisa disebutkan. Terima kasih dan maaf bila kelakuan ku membuat luka dihati kalian.

**Yogyakarta, 2011**

**Dendy H Nanda**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan</b>	i
<b>Halaman Pengesahan</b>	ii
<b>Halaman Motto</b>	iii
<b>Halaman Persembahan</b>	iv
<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Daftar isi</b>	vii
<b>Abstraksi</b>	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Pustaka	10
F. Perspektif Teoritik	18
A. Relasi-kuasa Foucault	18
B. <i>Panopticon</i> : Kuasa didipliner	21
B. CSR Dalam Perspektif Relasi-Kuasa	23
G. Metode Penelitian	25
Bagan Penelitian	31
<b>BAB II</b>	
<b>OBJEK PENELITIAN</b>	32
A. Gambaran Umum Lembaga Donor	32
B. Gambaran Umum LSM di Yogyakarta	36

## **BAB III**

<b>TEMUAN PENELITIAN</b>	42
<b>A. Proses Pengajuan Program</b>	42
1. Pengumuman Terbuka	42
2. Sosialisasi Terbatas	44
3. Hubungan Langsung	46
a. Penunjukan Langsung Oleh Lembaga Donor	46
b. LSM Lobi lembaga Donor	49
<b>B. Alasan/Pertimbangan Pemberian Dana</b>	49
1. Kepercayaan	50
a. Kinerja dan Reputasi	50
b. Kapasitas Lembaga	54
c. Pupularitas	57
2. Pertemanan dan Rekomendasi	57
a. Rekomendasi	58
b. Pertemanan	60
<b>C. Proses Penentuan Isu</b>	61
1. Mewacanakan Isu	62
2. LSM Mengusulkan/Mewacanakan Isu	64
3. Mengarahkan Isu	66
4. Kejadian Tak Terduga	68
<b>D. Proses Monitoring dan Evaluasi</b>	69
1. Jenis-Jenis Monitoring dan Evaluasi	70
a. Internal LSM	70
b. Internal Donor	71
c. Independen	73
2. Hal yang di Monitoring dan Evluasi	75
a. Keuangan	75
b. Administrasi	77

c. Hasil	78
<b>E. Relasi Antar LSM</b>	81
1. LSM Senior/Lama-LSM Baru	81
2. Antar Sesama LSM Besar/Senior	84
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMBAHASAN</b>	87
A. Review Umum	87
B. Wacana: Penegtahuan dan Kekuasaan	89
C. Panoptikum: Monitoring dan Evaluasi Sebagai Pendisiplinan	95
D. Kritik Idiologi CSR	100
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	117
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	



## **Abstract**

**Dendy H. Nanda. 07,331,104. Critical Study on Corporate Social Responsibility Relations: Authority in Funding Networking Program and NGOs in Yogyakarta. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social Culture, Islamic University of Indonesia. 2011.**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer just limited to acts of charity and social good of the company to its community; it has gone further, which has already been a business strategy. Even today some of the money CSR has entered into NGOs in Indonesia, especially in Yogyakarta. The entry of foreign companies CSR funds to NGOs that engage in the community certainly very surprising, seeing the spirit of corporations and NGOs are very different. The orientation of corporations is on financial gain, while the orientation of NGO is the empowerment of communities and is a non-profit agency. For that we need to consider the relation-corporate power carried on through NGOs' funding network channel. Here, authorization does not mean who controls whom, but rather on the strategies and interests that exist in relationships between companies and NGOs. Formulation of the problem of this research is how is the power relations within networks and program funding NGOs in Yogyakarta?*

*The method that is considered to be appropriate to address the formulation of such problems is to rely on qualitative research with a critical paradigm. The source of this study amounted to twelve people. Ten of them were activists and NGO leaders in Yogyakarta and the remaining two are former NGO activists.*

*The study produced several findings. First, the submission process is NGO programs working world, the announcement of an open, limited socialization and direct relationship. Second, the reasons and considerations of donors in providing funds to NGOs is the trust of friends and recommendations. Third, how to decide issue is, whether it is issue by donor agencies, NGOs issue. The issue is directed by the donor agency, and unexpected events. Fourth, the process of monitoring and evaluation done by three ways, namely an internal donor, NGO's internal and independent. However the monitoring and evaluation process are done in three activities, namely finance, administration and results. Fifth, in an effort to obtain funds from donor agencies will have its main office or a small NGO collaboration with larger NGOs. While the relationship between the members of the NGO funding process causes canalization.*

*The results of theoretical musing of the findings of the study are the first, donor agencies act to be superior using NGOs with funds they have. Second, the power of relationship that occurs between donor agencies and NGOs is the spread of democratization issues. Third, the Panopticon Through practice, monitoring and evaluation serve as a disciplinary tool of NGOs. Fourth, CSR funds that go to the NGO are part of the practice of neocolonialism as well as part of efforts to spread the idea neoliberalism.*

**Keywords:** *Corporate social responsibility, nongovernmental organizations, power relations, discourses, panopticon, neocolonialism, neoliberalism.*

## Abstrak

**Dendy H. Nanda (Nim 07331104), Skripsi, Studi Kritis Atas Corporate Social Responsibility: Relasi Kuasa Dalam Jejaring Pendanaan dan Program NGO di Yogyakarta. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.**

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi sebatas tindakan amal dan kebaikan sosial dari perusahaan ke masyarakatnya, ia telah melangkah lebih jauh, yakni sudah menjadi strategi bisnis. Bahkan saat ini sebagian dari uang CSR telah masuk ke LSM di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Masuknya dana CSR dari perusahaan asing ke NGO yang bergerak di bidang kemasyarakatan tentunya sangat mengherankan, melihat semangat korporasi dan NGO sangatlah berbeda. Korporasi yang orientasinya pada keuntungan finansial, sementara LSM orientasinya adalah pemberdayaan masyarakat dan merupakan lembaga non-profit. Untuk itu kita perlu memperhatikan relasi-kuasa yang dilakukan korporasi pada NGO melalui jejaring pendanaan yang mereka salurkan. Kuasa yang dimaksud disini bukan siapa menguasai siapa, tetapi lebih pada strategi dan kepentingan yang ada di dalam relasi antara perusahaan dan LSM. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana relasi kuasa dalam jejaring pendanaan dan program NGO di Yogyakarta?

Metode yang dirasa sesuai untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah penelitian kualitatif dengan bersandar pada paradigma kritis. Ada pun narasumber dari penelitian ini berjumlah dua belas orang. Sepuluh orang diantaranya adalah aktivis dan petinggi LSM di Yogyakarta dan dua lainnya adalah mantan aktivis LSM.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, proses pengajuan program dunia kerja LSM yaitu, pengumuman terbuka, sosialisasi terbatas dan hubungan langsung. Kedua, Alasan dan pertimbangan lembaga donor dalam memberikan dana ke LSM adalah kepercayaan pertemanan dan rekomendasi. Ketiga, cara penentuan isu yaitu, pewacanaan isu oleh lembaga donor, pewacanaan isu oleh LSM, isu diarahkan oleh lembaga donor, dan kejadian tak terduga. Keempat, proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 3 cara yaitu internal donor, internal LSM, dan independen. Sementara proses monitoring dan evaluasi terkonsentrasi pada tiga kegiatan saja, yakni keuangan, administrasi dan hasil. Kelima, dalam usaha mendapatkan dana dari lembaga donor LSM kecil akan menginduk atau kalaborasi dengan LSM besar. Sementara hubungan antar sesama LSM besar terjadi proses kanalisasi dana.

Hasil renungan dari teoritik dari temuan penelitian adalah, pertama, lembaga donor bertidak lebih superior dibanding LSM dengan memanfaatkan dana yang mereka miliki. Kedua, Relasi kuasa yang terjadi antara lembaga donor dan LSM adalah penyebaran isu demokratisasi. Ketiga, Melalui praktik *panopticon*, monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai alat pendisiplinan kerja LSM. Keempat, dana CSR yang masuk ke LSM merupakan bagian dari praktik neokolonialisme serta bagian dari upaya penyebaran gagasan neoliberalisme.

**Kata Kunci:** *Corporate social responsibility*, lembaga swadaya masyarakat, relasi kuasa, wacana, *panopticon*, neokolonialisme, neoliberalisme.







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal mula perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan terjadi sekitar tahun 1900-an. Hal ini didasari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu pengusaha yang memiliki perusahaan US Steel, Andrew Carnegie. Dalam bukunya *The Gospel Of Wealth*, Carnegie mengemukakan bahwa prinsip amal menganjurkan kepada anggota masyarakat yang memiliki keberuntungan dalam hidupnya membantu anggota yang kurang beruntung. Lebih lanjut lagi Carnegie mengatakan bahwa bisnis mengadakan kekayaan atau sumber-sumber milik masyarakat, dan mengembalikan sebagian besar dari hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (Poerwanto, 2010: 17).

Ada banyak definisi mengenai CSR. Widjaja dan Pratama (2008: 10) mengungkapkan bahwa CSR merupakan suatu *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan lingkungan perusahaan yang terkait kegiatan usaha. Robert J. Hughes dan Kapoor (1985) mendefinisikan CSR merupakan pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Sementara Peorwanto, mendefinisikan CSR sebagai

kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika (Poerwanto, 2010: 17-18).

Dari beberapa definisi di atas tentu dapat kita simpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tindakan moral perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, dimanakah sisi moral dari kegiatan CSR? Apakah dengan membantu korban akibat dari ulah atau kegiatan perusahaan mereka sendiri bisa dikatakan bermoral? Seperti yang diungkapkan Panimbang, bahwa melalui kegiatan CSR, perusahaan selalu memperoleh legitimasi atas aktivitasnya yang menghisap rakyat dan sumber daya alam di banyak negara yang tujuan akhirnya adalah akumulasi keuntungan yang setinggi-tingginya (gsbi.blogspot.com, 11 November 2011).

Seperti banyak kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalnya, perusahaan yang berbisnis di bidang kelapa sawit. Mereka membeli lahan dari warga sekitar lalu menebangi hutan yang ada dilahan itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, kemudian mereka menanam kembali beberapa pohon disekitar perkebunan kelapa sawit mereka dan ini dijadikan alasan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Apakah ini yang disebut tindakan bermoral? Bukankah pohon yang mereka tanam tidak sebanding dengan hutan yang mereka tebang yang mengakibatkan terjadi banjir dipemukiman warga sekitar?

Menurut Milton Friedman sang teoris neoliberal dalam esainya “*The Social Responsibility Of Bisnis is To Increase Its Profits*”, tujuan utama CSR adalah untuk mencari keuntungan semata. Tugas perusahaan adalah mencetak uang sebanyak mungkin, perusahaan tidak perlu memikirkan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, tugasnya hanyalah melayani *consumer*, dan *costumer* menarik jasa dari produk dan jasa yang dihasilkan. CSR tidak lebih hanya sekedar sebagai strategi bisnis perusahaan dalam menjaga citra perusahaan (Widjaja & Pratama, 2008: 52).

Bahkan ditambahkan Akbar (Kompasiana.com, 3 Oktober 2010), CSR merupakan alat bantu, agar kelompok yang sedang berada dalam tekanan ekonomi tidak menjadi gelap mata karena penderitaannya itu. Namun, tidak sedikit yang percaya bahwa CSR hanya satu bagian kecil dari upaya mewujudkan masyarakat 20:80, suatu keadaan dimana seperlima dari keseluruhan populasi menguasai 80% kekayaan. CSR, menurut pandangan ini, hanyalah bagian dari suatu teknik bagaimana agar masyarakat menerima 20% kekayaan ekonomi tetap merasa nyaman, ketika 80% sumber daya ekonomi dikuasai oleh seperlima kelompok dari mereka.

Hal ini semakin meyakinkan penulis bahwa kegiatan CSR tidak lebih sebagai akal-akalan perusahaan untuk mengembalikan citra perusahaan yang terkena kasus atau kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Atau sebagai upaya pembentukan citra perusahaan

dikalangan masyarakat untuk melegalkan perbuatan perusahaan mereka yang sebenarnya bermasalah. CSR merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengambil hati masyarakat agar bersimpati pada perusahaan. Dapat dianalogikan, CSR adalah obat penenang yang semu tetapi tidak menyembuhkan. Seperti yang diungkap oleh Lydya Sarmiento dan Natalie Cristine V. Jorge dalam sebuah simposium CSR Expo di Manila, menyampaikan bahwasannya terdapat beberapa kategori bagi perusahaan yang menjalankan CSR. *Pertama*, perusahaan hanya berkontribusi pada ranah sosial sebagai sebuah keuntungan bisnis, *kedua*, tanggung jawab sosial dijadikan sebagai sebuah perangkat yang jitu sehingga dapat berkontribusi untuk meminimalisir permasalahan sosial, dan *ketiga*, tanggung jawab sosial perusahaan dijadikan sebagai sebuah bagian strategi dalam melanggengkan bisnis, sehingga diperlukan upaya CSR yang berkelanjutan (Kompasiana.com, 20 April 2011).

Peorwanto (2010: 27), menuturkan bahwa perusahaan-perusahaan moderen banyak yang menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai investasi. Ada beberapa bentuk kegiatan CSR, sebelum tahun 1930-an mencakup 3 hal. *Pertama*, kondisi kerja, mendeskripsikan pentingnya keuntungan yang diperoleh karyawan berkaitan dengan sistem balas jasa yang mencakup gaji, tata ruang kerja yang memenuhi syarat kesehatan, keselamatan kerja, serta hari tua. *Kedua*, hak-hak pelanggan, yaitu hak-hak yang mencakup kualitas produk, layanan dan informasi yang sesuai dengan pengorbanan pelanggan dalam upaya memperoleh produk

yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, *ketiga*, perhatian terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur langsung kegiatan bisnis maupun tidak.

Namun, seiring bejalannya waktu dan dinamika sektor bisnis perusahaan serta menurunnya kemampuan sumber-sumber daya yang digunakan, bentuk-bentuk praktik CSR pun turut berubah. Perubahan praktik CSR sesuai dengan konsen perusahaan itu sendiri, sehingga kegiatan CSR disetiap perusahaan akan berbeda disetiap praktiknya. Namun pada intinya tujuan praktik CSR perusahaan tetap sama yakni untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Belakangan, dana program CSR perusahaan (baik perusahaan asing maupun domestik) masuk ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut *Commons Dreams* (2005), pendanaan korporat ke LSM telah bertumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ini (kelompok kerja Akuntabilitas OMS, 2006: 182). Data dari *Centre on Philanthropy* pada tahun 2005, donasi korporat Amerika Serikat ke lembaga amal dan yayasan-yayasan mencapai US\$500 juta. (Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS, 2006: 169).

Di Indonesia, misalnya, *Institute for Studies Multiculturale and Pluralisme (IMPULSE)* dan *Combine Resource Indonesia (CRI)*. Dua NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan politik masyarakat dan penelitian ini didanai oleh salah satu pelaku bisnis atau investor besar Amerika Serikat, George Soros. Dengan bertolak pada spirit peduli sosial,

George Soros membentuk “yayasan” Open Society Institute. Open Society Institute merupakan bagian dari pelembagaan semangat CSR. Dari Open Society Institute inilah, dana-dana CSR dikucurkan melalui lembaga *funding* di bawah asuhannya ke NGO-NGO di tanah air, seperti Yayasan Tifa.

Yayasan Tifa merupakan salah satu yayasan yang bermitra dengan *Open Society Institute* yang didirikan oleh George Soros. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menyokong kehidupan demokrasi di Indonesia (Vivanews.com). Sementara *Open Society Institute* didirikan atas dasar keprihatinnan George Soros atas sistim kapitalis saat ini. Menurutnya kapitalisme berada dalam krisis dan membahayakan masyarakat terbuka. Praktek kapitalisme telah menciptakan suatu jenis “masyarakat tertutup” (George Soros, 2007: vi).

Masuknya dana perusahaan asing ke NGO yang bergerak di bidang kemasyarakatan tentunya sangat mengherankan, melihat semangat korporasi dan NGO sangatlah berbeda. Korporasi yang orientasinya pada keuntungan finansial sangat kontras dengan NGO atau LSM, yang menurut Locke, merupakan bagian dari peradaban yang berada di luar kendali pemerintah dan pasar (*market*) termarginalisasi oleh keduanya (Widjajanto, 2007: 5), yang orientasinya adalah pemberdayaan masyarakat dan merupakan lembaga non-profit.

Menurut Bandell & Cox (Kelompok Kerja Ankutabilitas OMS, 2006: 166) para pendonor mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi

apakah LSM mempunyai sumberdaya untuk melakukan pekerjaannya dan bagaimana mereka dapat melakukannya. Melihat kenyataan betapa para pendonor memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor LSM.

Seharusnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM tidak bisa diintervensi, mengingat LSM merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat sipil. Bagi kaum Lockean, masyarakat sipil merupakan manifestasi tertinggi sistem demokrasi dan secara moral, masyarakat sipil berada dalam posisi yang lebih superior dari negara maupun pasar (Widjajanto, 2007: 6).

Menjadi menarik kemudian, memperhatikan relasi-kuasa yang dilakukan korporasi pada NGO melalui jejaring pendanaan yang mereka salurkan. Kuasa yang dimaksud disini bukan siapa menguasai siapa, tetapi lebih pada strategi atau kepentingan yang ada di dalam relasi antara perusahaan dan LSM. Mengikuti pemikiran Foucault, kekuasaan tak harus tunggal atau diandaikan sebagai posisi tertentu yang rigid. Tetapi juga berupa regulasi dan aturan-aturan main yang dibentuk seperti jejaring pendanaan korporasi pada NGO.

## **B. Rumusan Masalah**

Pendanaan dan program LSM menjadi masalah yang menarik bagi penulis. Seperti yang telah penulis tegaskan di atas, bahwa dana yang masuk ke LSM merupakan dana hibah dari perusahaan asing. Disadari atau tidak, sedikit banyak pendanaan tentu berpengaruh pada keputusan

LSM dalam merumuskan program-program dan menjalankan agenda-agendanya. Sementara, LSM susah menjalankan program-programnya tanpa adanya dana. Disini, tentu selalu ada intervensi yang samar-samar, dan ketergantungan yang malu-malu LSM pada lembaga donor.

Menjadi menarik kemudian melihat relasi kuasa antar pendanaan dan keputusan membuat program dalam LSM. Karena, mengingat posisi LSM yang mengemban kepentingan masyarakat sipil, yang menurut Triwibiwo (2006: 13), ornop atau LSM sebuah bentuk organisasi yang berorientasi nirlaba mempunyai basis keterlibatan yang suka rela dan tidak terkait dengan agama serta mempunyai tata kelola yang mandiri. Sedangkan perusahaan mengemban kepentingan pasar (*market*). Jelas, terasa ada aroma paradoksalitas yang mencuat.

LSM Yogyakarta menjadi objek kajian penulis dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang cukup banyak memiliki lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kedua, kedekatan penulis pada objek kajian, sehingga penulis lebih mudah dalam mengakses data-data dari narasumber. Ketiga, pertimbangan Yogyakarta merupakan kota yang unik. Beragam suku, budaya, agama ada di dalamnya. Singkatnya, Yogyakarta adalah kota plural. Tentu, pluralitas Yogyakarta senafas dengan “nilai” yang disebarluaskan oleh yayasan amal George Soros, selaku Bos, yang disinyalir mengalirkan dana ke LSM-LSM di Indonesia yaitu: *open society*, masyarakat yang terbuka.

Dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi-kuasa dalam jejaring pendanaan dan program *NGO* di Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana relasi-kuasa dalam jejaring pendanaan dan program *NGO* di Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis:**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis untuk kepentingan penelitian lanjutan bagi mahasiswa-mahasiswa Komunikasi, lebih khusus di bidang *public relations*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis terhadap khazanah pemahaman CSR dan LSM

#### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para aktivis LSM agar dalam hubungannya dengan lembaga donor tetap bersikap kritis dan menjaga independensinya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kajian kritis-evaluatif atas CSR, LSM dan Lembaga Founding dalam

menjalankan peran-perannya dilapangan masyarakat. Sehingga tercipta kerjasama yang fair dan setara.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang penulis lakukan ini didasarkan pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. *Pertama*, skripsi Fitri Annisa (03/171813/20442), mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Universitas Gajah Mada dengan judul “*Otonomi LSM Terhadap Donatur: Kasus Pada LSM Rifka Annisa Yogyakarta*”. *Kedua*, skripsi Irma Nur Sholikhati (06331026), mahasiswa Ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Implementasi Program corporate social Resposibility (CSR) PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon Distribusi Jawa Barat dan Banten*”. *Ketiga*, “*Pengaruh program Corporate Social Resposibility (CSR) dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan PT. Telkom Kandel Yogyakarta*”, penelitian ini merupakan skripsi Nita Megayanti (04331028), Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. *Kempat*, skripsi dengan judul “*Public Relation dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*” yang disusun oleh Dyah Wulandari Setyarini (96/108107/SP/1768), mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada.

Penelitian pertama, dengan judul “*Otonomi LSM Terhadap Donatur: Kasus Pada LSM Rifka Annisa Yogyakarta*” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti ini fokus pada masalah otonomi LSM terhadap pendonor (donatur) dan strategi LSM untuk mempertahankan otonominya terhadap donatur. Rumusan masalahnya yaitu *pertama*, sejauh mana Rifka Annisa otonom terhadap donor?. *Kedua*, strategi apa saja yang dilakukan LSM tersebut untuk mempertahankan otonominya?

Pada penelitian ini dikemukakan bahwa menjamurnya LSM di negara berkembang tidak lepas di fenomena maraknya lembaga-lembaga dana, khususnya dana asing yang menyalurkan dananya ke LSM-LSM. Dengan demikian LSM lahir tidak lagi sebagai saran untuk merespon kegelisahan masyarakat atas pemerintah, tetapi lebih karena banyaknya donatur-donatur yang memberikan dana cuma-cuma. Sehingga mengakibatkan hidup-matinya LSM tergantung pada donatur, karena tidak adanya opsi atau pilihan lain dalam pendanaan programnya.

Dia menambahkan bahwa pihak donor seringkali mempengaruhi kewenangan yang negatif dalam menentukan tujuan, perencanaan, maupun pelaksanaan program kegiatan LSM. Dengan demikian konsep *civil society* telah mengalami penyimpangan. LSM tidak lagi dapat menghasilkan program yang radikal yang menyentuh akar permasalahan masyarakat yang diembannya tetapi telah mengemban kepentingan donatur selaku pendonor.

Hubungan antara LSM dan donatur dianggap benar apabila visi dan misi LSM dan donatur tidak bertentangan. Dalam mencapai tujuannya

LSM dan donatur terkadang bekerja sama, LSM dan donatur memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam mencapai tujuannya mereka dapat melakukan program yang sama, sehingga LSM menjadikan donatur sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini, Annisa juga menuliskan beberapa otonomi LSM terhadap donor. *Pertama*, otonomi ide, terkait dengan gagasan awal atau "keorisinilan" LSM. *Kedua*, otonomi pengorganisasian, LSM harus mampu mandiri dan bebas dari campur tangan donatur dalam mengorganisir dirinya. *Ketiga*, otonomi finansial, yaitu kewenangan LSM dalam mengalokasikan dana dalam programnya.

Dari hasil *review* tinjauan pustaka di atas, peneliti menarik kesimpulan. *Pertama*, berdirinya LSM di suatu negara khususnya negara berkembang tak lepas dari banyaknya donatur asing yang bermunculan. *Kedua*, ketergantungan yang sangat besar pada donatur menyebabkan hidup-matinya suatu LSM tergantung pada donatur. *Ketiga*, donatur seringkali mempengaruhi kewenangan yang negatif dalam menentukan tujuan, perencanaan, maupun pelaksanaan program kegiatan LSM.

Melihat penelitian di atas, peneliti ingin menelusuri lebih jauh hubungan antar LSM dan perusahaan asing. Peneliti menilai relasi-kuasa tidak sekedar otonomi LSM terhadap donor, ada persoalan yang lebih kompleks yang terjadi dalam hubungan donatur dengan LSM. Seperti yang dikatakan peneliti di atas, LSM lahir karena donor, tapi pertanyaannya apakah LSM telah dikuasai donatur sebagai pihak pemberi dana? Atau

sebaliknya, donatur hanya dimanfaatkan LSM sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Demi menjawab pertanyaan itulah maka penelitian ini fokus pada relasi-kuasa antara LSM dan perusahaan asing sebagai pihak pendonor.

Dalam penelitian kedua, dengan judul “*Implementasi Program corporate social Responsibility (CSR) PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon Distribusi Jawa Barat dan Banten*”. Rumusan masalahnya yaitu “*Bagaimana Implementasi Program Corporate social Responsibility (CSR) PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon Distribusi Jawa Barat dan Banten ?*”.

Penelitian ini bertujuan mencari implementasi program CSR yang dilakukan PT PLN (Persero) area pelayanan dan jaringan Cirebon yang diimplementasikan melalui *Comunnity Development* dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), serta untuk mengetahui bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) area pelayanan dan jaringan Cirebon dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Sholikhati berpendapat bahwa setiap perusahaan besar maupun kecil merupakan bagian dari lingkungannya. Semua perusahaan mempunyai hubungan yang kompleks dengan masyarakat dan kelompok organisasi yang berkepentingan. Perusahaan dalam mencapai kemajuan tidak lepas dari peran masyarakat yang ada dilingkungan perusahaan itu berada.

Karena semua kegiatan perusahaan akan berdampak pada lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakatnya.

Sholikhati menambahkan, kegiatan CSR perlu dilaksanakan agar berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Serta membangun pencitraan yang positif dengan cara menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar yaitu hubungan dengan masyarakat, sejumlah LSM dan pemerintah. Hal ini bertujuan memberikan dampak yang positif dari keberadaan perusahaan bagi lingkungannya.

Peneliti berkesimpulan bahwa saat ini pembangunan komunitas sekitar perusahaan tidak sekedar dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberian donasi atau bantuan semata, melainkan perusahaan juga ikut mengembangkan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh PT PLN diantaranya adalah adanya tuntutan yang berlebih dari berbagai pihak mengenai bantuan program *Community Development*, dan sulitnya merubah *mind-set* (kerangka pikir) dari masyarakat yang lebih mengharapkan bantuan untuk kepentingan jangka pendek.

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Pengaruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan PT. Telkom Kandel Yogyakarta*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif eksplanatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perhatian konsumen yang lebih terhadap kegiatan suatu perusahaan. Perusahaan tidak hanya dilihat dari produk-produk yang dihasilkan perusahaan saja. Tetapi lebih dari itu, konsumen mulai melihat bagaimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga mendorong perusahaan untuk membangun citra positifnya terhadap masyarakat.

Megawanti mengatakan bahwa pembentukan citra akan menghasilkan citra perusahaan dan berdampak pada persepsi yang secara umum dalam menggambarkan keberadaan perusahaan tersebut. Konsumen dengan citra yang positif dari suatu produk, lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, semakin positif citra yang dibentuk oleh suatu perusahaan maka kemungkinan konsumen untuk memilih atau membeli suatu produk semakin besar.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, praktik CSR dan citra perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan PT. Telkom Kandel Yogyakarta. Program CSR mempunyai pengaruh sebesar 15,6% terhadap loyalitas pelanggan PT. Telkom Kandel Yogyakarta, sedangkan citra perusahaan memiliki pengaruh sebesar 18,6%. Aktivitas CSR PT. Telkom Kandel Yogyakarta mampu memberikan citra positif PT. Telkom Kandel Yogyakarta.

Kempat, penelitian dengan judul "*Public Relation dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan*" menggunakan metode penelitian studi kasus.

Wawancara dan observasi dijadikan alat pengumpulan data. Fokus dari penelitian ini yaitu tanggung jawab sosial perusahaan PT Taman Safari Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran PR PT. Taman Sari Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan?

Pada penelitian ini, Setyarini mengungkapkan, bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan industri kapitalisme akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kerusakan itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu penebangan hutan secara liar, polusi udara, limbah perusahaan multinasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati tercatat sebagai pengekspor kekayaan alam dunia terbesar.

Sebagai respon atas fenomena kerusakan lingkungan yang sudah amat parah dan sangat meresahkan, maka bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyelamatan lingkungan, baik itu pemerintah maupun swasta. Salah satunya adalah PT Taman Safari Indonesia, keberadaannya menjadi suatu bentuk usaha dalam pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Setyarini, sebagai perusahaan yang bernaung di bidang lingkungan hidup serta berdiri di lingkungan masyarakat perkotaan, PT. Taman Syafari Indonesia menyadari pentingnya berhubungan baik dengan masyarakat, untuk itulah PT. TSI menjadikan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik

dengan masyarakat sekitar perusahaan dan pencitraan diri yang positif di masyarakat.

Dari ketiga penelitian tentang CSR di atas, peneliti melihat ada kecenderungan yang sama dalam melihat CSR sebagai suatu strategi perusahaan. *Pertama*, CSR selalu dijadikan sebagai alat untuk pencitraan positif perusahaan. *Kedua*, CSR perusahaan cenderung mempengaruhi persepsi masyarakat secara umum dalam menggambarkan keberadaan perusahaan. *Ketiga*, strategi CSR perusahaan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk penggunaan produk suatu perusahaan. *Keempat*, praktik CSR setiap perusahaan berbeda sesuai dengan *konsen* dari perusahaan yang bersangkutan.

Berbeda dengan ketiga peneliti CSR diatas, penelitian ini lebih melihat praktik CSR sebagai suatu strategi bisnis organisasi atau *corporate*. Peneliti beranggapan bahwa praktik CSR tidak lebih sebagai suatu strategi perusahaan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. CSR bukan lagi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungannya seperti gagasan awal dari berdirinya CSR. Bukan sebagai tindakan moral perusahaan. Bukan juga sebagai dana hibah yang diberikan perusahaan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ada kuasa di balik itu. Menelisik pemikiran Foucault, bahwa kekuasaan ada dimana-mana, menyebar tanpa batasan tertentu, dan kuasa itu merupakan suatu strategi.

## F. Perspektif Teoritik

### 1. Relasi-Kuasa Foucault

Foucault adalah seorang pemikir berkebangsaan Prancis yang tertarik pada pengetahuan dan filsafat. Padahal dia lahir dari keluarga yang *background* keilmuannya adalah kedokteran. Tapi meski Foucault lebih tertarik dengan filsafat, Foucault serius mengkaji ilmu-ilmu yang masih dekat dengan “rumpun” keilmuan medis. Salah satu teori penting Foucault adalah relasi kuasa pengetahuan.

Untuk memahami teori relasi kuasa pengetahuannya Foucault, kita dapat menelisik dari sejumlah karya-karya Foucault. Secara garis besar, ada dua konsep pokok yang kemudian menjadi kluster memahami mata rantai pemikirannya yaitu “arkeologi” dan “genealogi”.

Dalam karyanya yang berjudul “*The Archaeology of Knowledge*”, Foucault mulai membicarakan tentang kuasa namun masih secara implisit. Pada masa ini (arkeologi), kuasa masih cenderung dilihat dengan cara negatif, karena membatasi diskursus (Santoso, dkk, 2007: 176). Hal ini dapat kita lihat pada pemikiran Foucault tentang sejarah kegilaan hingga melahirkan penjara dan panti sosial untuk mengurung orang gila. Ini diilhami dengan adanya wacana atau pemikiran tentang orang gila pada abad ke 17 di Prancis. Pada periode itu kegilaan dianggap sampah, dipandang sebagai binatang dan tidak berguna. Dengan adanya wacana tentang kegilaan maka lahirlah tempat pengurungan. Jadi, pendek kata pengetahuan tentang kegilaan

melahirkan pengurangan atau pada waktu itu disebut *Hospital General* (Bertens, 2006: 138).

Dalam pemikiran selanjutnya (geneologi), baru kuasa menjadi hal terpenting dalam pemikirannya. Hal ini terlihat pada karyanya yang berjudul "*Geneology of Power*", di sini, ia cenderung melihat kuasa sebagai suatu yang positif, sesuatu yang produktif.

Dalam buku "*Menjaga dan Menghukum*" dan "*Sejarah Seksualitas*" ia menganalisa strategi kuasa pada bidang yang kongkret (Bertens, 2006: 354). Di sini ia membicarakan kekuasaan atas tubuh yang disebutnya sebagai kekuasaan bio-medis, tubuh yang diisolasi dan dikonseptualisasikan, di mana tubuh telah menjadi komponen-komponen yang penting bagi pelaksanaan hubungan-hubungan kuasa dalam masyarakat modern (Santoso dkk, 2007: 179). Munculnya kekuasaan bio-medis ini bentuk bentuk karakteristik dari produksi-kapitalisme (Jones, 2009: 181).

Kuasa bagi Foucault sama dengan serba banyak relasi kuasa yang bekerja disuatu tempat atau waktu. Bagaimana keberfungsian kuasa pada bidang tertentu (Bertens, 2006: 354). Kuasa merupakan hubungan-hubungan bermacam kekuatan yang imanen di dalam kekuatan yang berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya (Santoso dkk, 2007: 170). Jadi, selalu ada interaksi-interaksi satu sama lain dalam membentuk kekuasaan.

Menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan berhubungan satu sama lain. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi-relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, karena pengetahuan berguna bagi kuasa dan ilmu pengetahuan menyediakan kuasa. Pengetahuan itu tidak mungkin netral dan murni. Pengetahuan itu bersifat politis karena pengetahuan dimungkinkan oleh relasi-relasi kuasa. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar keungkinannya sendiri, suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa (Bertens, 2006: 135-136)

Memang dalam memandang kuasa, Foucault cenderung berbeda dengan Karl Marx. Menurut Foucault, analisis Marxisme tentang kuasa tidak memuaskan (Bertens, 2006: 353). Marxisme lebih memandang kekuasaan pada hal yang negatif atau kepemilikan, seperti orang-orang yang berkuasa atas orang lain, raja, lembaga-lembaga pemerintah, tuan tanah, negara, dll.

Foucault memandang kuasa tak lebih sebagai strategi. Kuasa tidak dimiliki, tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Strategi kuasa berlangsung dan ada dimana-mana, dimana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja (Bertens, 2006: 354-355).

Lebih jauh, Foucault mengatakan kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperoleh, dirampas atau dibagi-bagi, sesuatu yang digenggam atau dibiarkan lolos. Oleh karenanya, kekuasaan tidak selalu represif tapi juga produktif dan positif (Santoso, dkk, 2007: 170). Kuasa memproduksi realitas dan kebenaran melalui normalisasi dan regulasi (Bertens, 2006: 356).

## 2. *Panopticon*: Kuasa Disipliner

Berangkat dari pemikiran Foucault pada kajiannya tentang *Discipline and Punish*, dia berpendapat bahwa pengetahuan tidak lagi membebaskan dan menjadi metode pengawasan, peraturan, dan pendisiplinan (Sarup, 2008: 102). Sementara kuasa merupakan strategi, kuasa berjalan tidak bekerja melalui penindasan melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi memungkinkan untuk seseorang patuh akan suatu keadaan. Sementara regulasi berguna sebagai mesin sortir (Bertens, 2006: 357). Foucault menyebutnya sebagai kuasa disiplin. Tujuan dari kuasa disiplin adalah untuk membentuk tubuh yang patuh dan dapat ditundukan, dimanfaatkan, ditransformasikan, dan dapat ditingkatkan gunanya (Santoso dkk, 2007, 183)

Berbeda dengan kekuasaan monarki, dimana kekuasaan ada pada kekuasaan lembaga, pada ranah kuasa disiplin, kuasa terjadi pada sistem pengawasan yang dibatinkan sampai pada dimana setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri (Sarup, 2008: 103). Sistem pengawasan

atas diri sendiri ini disebut sebagai *panopticon*. Konsep *panopticon* merupakan konsep arsitektural yang dirancang oleh Jeremy Betham pada tahun 1834. Di penjara dibuat menara yang diisi penjaga penjara yang dikelilingi oleh sel-sel penjara yang dibuat melingkar. Gagasannya adalah untuk menjamin agar para narapidana tidak lepas dari pengawasan serta untuk meyakinkan narapidana untuk memenuhi peraturan penjara dan lambat laun mereka menjadi pengawas atas diri mereka sendiri (Jones, 2009: 189).

Kemudian Foucault mengadopsi konsep *panopticon* ini di kehidupan sehari-hari tentang pengawasan diri: "mirip sebuah tropong (*gaze*) serta konsep maha tahuNya Tuhan kristen. Dimana setiap orang tak lepas dari pemantauannya, sehingga seseorang dikondisikan untuk mengawasi dirinya sendiri (Sarup, 2008: 104).

Pada ranah lain, kuasa disiplin memegang peran penting pada pekerjaan. Pekerjaan dimungkinkan karena normalisasi menjadikan manusia sebagai tenaga kerja. Pekerjaan merupakan suatu cara untuk melatih dan menanamkan disiplin. Untuk mewujudkan normalisasi maka perlu dikembangkan suatu sistem yang amat kompleks, malah kontrol semua orang atas semua orang (Bertens, 2006: 357). Untuk itu perlu kuasa disiplin, tubuh yang disiplin akan mudah untuk dimanipulasi dan diatur (Santoso dkk, 2007 :184). Tubuh yang patuh ini juga merupakan tubuh yang produktif dan berguna untuk produksi kapitalis (Jones, 2009: 181).

### 3. CSR dalam Perspektif Relasi-Kuasa

Sudah terlalu sering kita mendengar ungkapan mengenai tanggung jawab sosial, dana santunan, dana sukarela atau dalam pendidikan disebut beasiswa yang diberikan oleh perusahaan. Dalam suatu perusahaan, praktik itu dinamakan *Corporate social responsibility* (CSR) atau dalam bahasa Indonesia disebut tanggung jawab sosial perusahaan.

Terkadang kita tidak tahu atau sengaja tidak diberi tahu oleh perusahaan apa itu CSR dan maksud serta tujuan dari pemberian dana CSR. Ada banyak pendapat mengenai CSR. Ada yang berpendapat bahwa CSR merupakan tindakan moral, amal, kebaikan hati serta kedermawanan organisasi. Seperti yang diungkapkan David Baron (Poerwanto, 2010: 18), bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan pada pihak lain.

Sebaliknya, di lain pihak, beranggapan bahwa praktik CSR tidak lebih sebagai strategi bisnis perusahaan yang bertujuan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan ini merupakan gambaran industri kapitalis. Sehingga layak disebut *business social responsibility* atau *corporate citizenship* (Widjaja&Pratama, 2008: 8).

Menurut Widjaja dan Pratama (2008: 26), *corporate citizenship* merupakan upaya perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan pihak lain sebagai salah satu cara untuk

memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Upaya memperbaiki reputasi tentunya bagian dari strategi perusahaan untuk tetap bertahan dan tetap eksis dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif .

Menjadi aneh kemudian melihat praktik CSR terlahir sebenarnya akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat mengagap perusahaan sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Tapi keadaan tersebut justru dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi bisnis baru yang menguntungkan. Menurut Wahyudi dan Azhari (2011-05-21: XXii), CSR bermamfaat bagi perkembangan bisnis dan perusahaan itu sendiri. Dan secara faktual CSR bukan lagi sekedar “*trend*” dalam arti tanggung jawab etis, tetapi merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan perusahaan sebagai ujud dari tanggung jawab sosial yang timbul dari pembangunan ekonomi terhadap lingkungan eksternalnya.

Ketika strategi CSR telah dijadikan alat untuk kegiatan bisnis perusahaan, maka secara tidak langsung teori mengenai CSR sebagai tindakan amal sosial” mati” dengan sendirinya. Tidak mungkin kegiatan amal sejalan dengan kegiatan bisnis. Karena tindakan amal dan bisnis sangat bertolak belakang. Kedua-duanya mempunyai sisi yang berbeda, berlawanan. Kegiatan amal merupakan kegiatan kedarmawanan, tanpa imbalan apapun, dan mengarah kesifat sukarela. Sedangkan bisnis

tentunya mempunyai motif, kepentingan, tujuan tertentu, dalam hal ini tentunya keuntungan (laba) sebagai tujuan akhir suatu organisasi.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersandar pada paradigma kritis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6). Menurut Fracken (Branen, 2005: 11), dalam penelitian kualitatif peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif serta tetap mengambil jarak, hal ini bertujuan agar peneliti mencapai wawasan-wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial responden.

Paradigma kritis memandang keberadaan manusia adalah hal yang yang memungkinkan untuk dikritisi agar masyarakat mengalami perubahan dan menjadi emansipatif. Paradigma ini bertujuan untuk membuka, memindahkan, dan membuang keyakinan-keyakinan serta ide-ide keliru tentang masyarakat dan realitas sosial serta ada ketertarikan pada hal-hal yang tersembunyi dan tidak menjadi kepedulian karena realitas yang dihalangi secara utuh (Audifax, 2008: 28-29).

Paradigma kritis juga memandang realitas diciptakan oleh manusia bukan ada dengan sendirinya. Realitas merupakan suatu yang kompleks dan penuh kontradiksi serta terjadi eksploitasi pada pihak yang “lemah” posisinya. Pada dasarnya fokus dari paradigma ini adalah untuk pencarian suatu kontradiksi yang tersembunyi dibalik ideologi serta membuka ruang untuk suara-suara yang terbungkam oleh kekuasaan (Audifax, 2008: 31). Ada beberapa aliran mazhab secara esensial yang terbiasa menggunakan tradisi kritikal, yakni tradisi teori kritis neo-Marxis yang dihubungkan paling dekat dengan karya Horkheimer, Adorno, dan Marcuse; tulisan-tulisan genealogis Michel Foucault; praktik-praktik dekonstruksi post-strukturalis yang dikaitkan dengan Derrida; dan aliran-aliran kaum post-moderenis yang dihubungkan dengan Derrida, Foucault, Lyotard, Elbert, dan yang lainnya (Denzin & Lincoln, 2009: 173).

Penelitian dalam paradigma kritis harus dikaitkan dengan sebuah usaha untuk menentang ketidakadilan dalam suatu masyarakat tertentu atau kungkungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pada tradisi pemikiran kritik Foucault, mengundang para peneliti untuk menjelajah cara-cara yang melibatkan berbagai diskursus ke dalam relasi-relasi kekuasaan dan bagaimana pengetahuan secara dialektis bertindak selaku pemicu ulang praktik-praktik yang mengatur apa yang dipandang logis dan benar. (Denzin & Lincoln, 2009: 174).

## 2. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu, *NGO* di Yogyakarta. Lokasi dan narasumber dalam penelitian ini akan dilakukan dengan model bola salju (*snowball*). Bernard (2001:94) mengatakan, *snowball sampling* adalah cara yang efektif untuk membangun kerangka pengambilan sampel yang mendalam, dalam populasi yang relatif kecil, yang masing-masing orang cenderung melakukan hubungan satu dan lainnya ([duniaartikelartikel.blogspot.com](http://duniaartikelartikel.blogspot.com)).

Dalam pengambilan sampel ini, penulis menentukan satu atau lebih individu atau tokoh kunci dan meminta dia untuk menyebut orang-orang lain yang pada gilirannya dapat ditemui. Lokasi dan narasumber penelitian akan dimulai dari *CRI (Combine Resourch Indonesia)*, salah satu *NGO* yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan sumber informasi publik di Yogyakarta.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pada penelitian ini juga akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara adalah mencatat jawaban responden atas pertanyaan dari peneliti atau *interviewer* (Ruslan, 2008: 221). Sementara menurut Daymon dan Holloway (2008: 259), Wawancara lebih dari sekedar percakapan dan selalu memiliki tujuan. wawancara sangat fleksibel dan mengizinkan

peneliti untuk memahami prespektif dari orang-orang yang diwawancarai.

#### **b. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya pengumpulan data. Menurut Linclon, pengamatan secara langsung atas apa yang akan kita teliti sangat peneting agar tidak terjadi kekeliruan, keraguan serta untuk memahasi situasi-situasi yang dalam penelitian. Dia juga juga berpendapat bahwa dalam pengamatan, peneliti dimungkinkan untuk mencatat peristiwa-peristiwa dalam situasi yang berkaitan dalam pengumpulan data (Moleong, 2010: 174-175).

#### **4. Jenis Data**

Terdapat dua jenis data yang biasa digunakan dalam penelitian. *Pertama*, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi yang dilakukan. *Kedua*, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Perolehan data skunder dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen dan arsip-arsip yang dapat menunjang penelitian ini.

## 5. Analisis Data

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengoding, menyusun menjadi katagori, dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana. (Daymon & Holloway, 2008: 369)

### b. Katagoriasi Data

- 1) Menyusun katagori. Katagoriasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- 2) Setiap katagori diberi nama yang disebut “label” (Moleong, 2006: 288)

### c. Penyajian Data

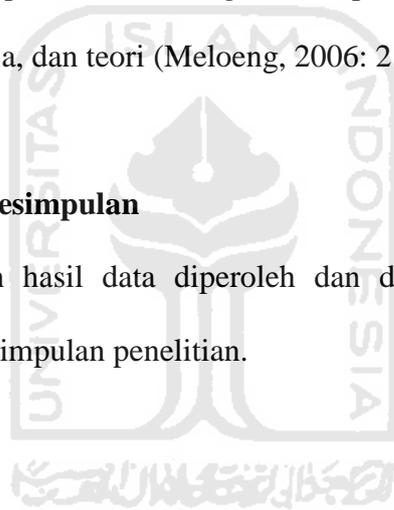
Proses ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi dan katagoriasi data. dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, dalam artian analisis tersebut diteruskan atau masih memperdalam temuan-temuan yang belum diperoleh.

#### **d. Refleksi Teori**

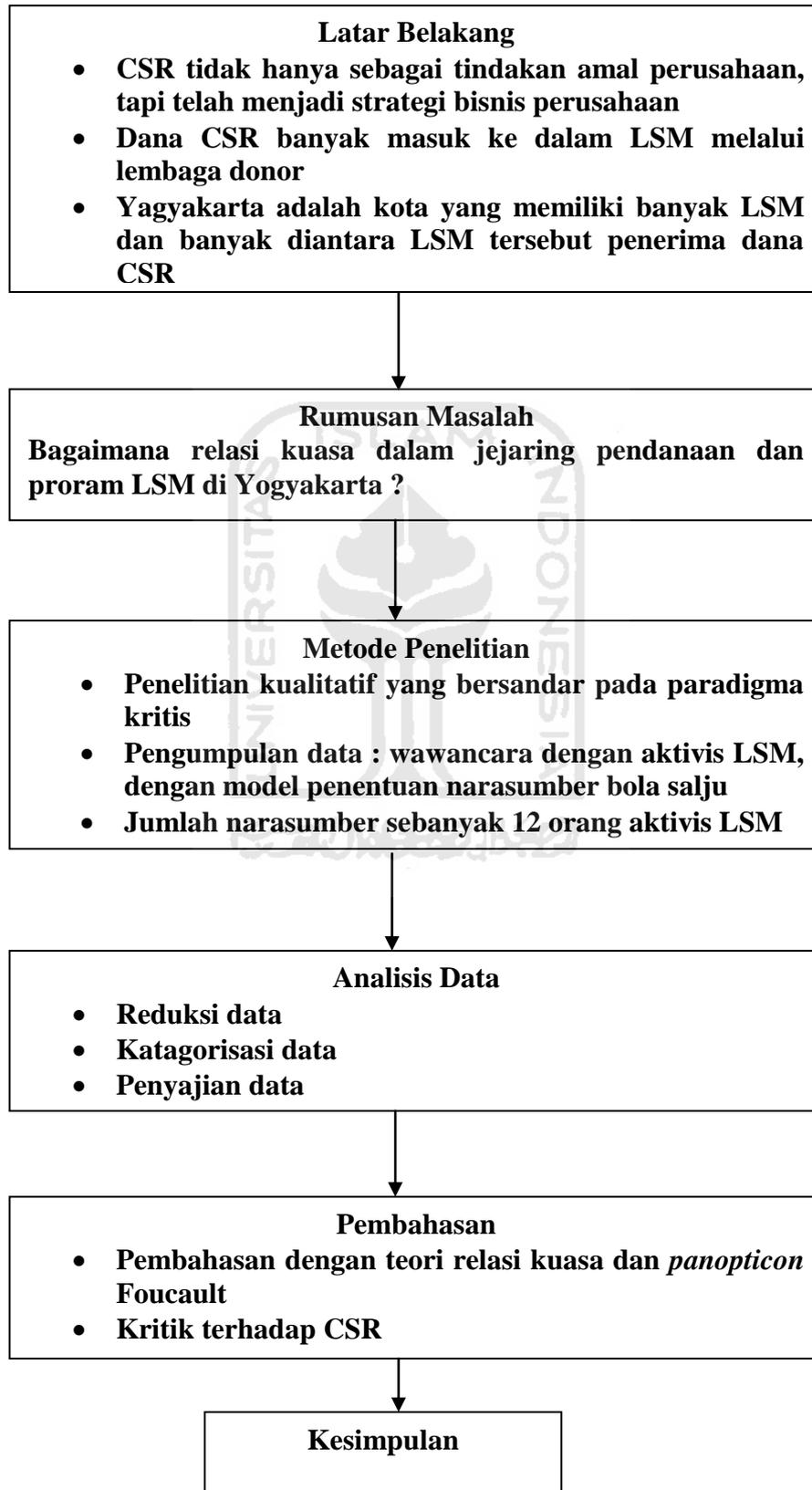
Menguraikan temuan dalam penelitian dengan teori yang berhubungan dengan penelitian, namun harus ada kaitanya antara teori yang dibuat dengan penelitian yang diambil. Tujuannya adalah untuk memperbaiki catatan lapangan dan untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan studi ini dikemudian hari. Termasuk yang terpenting dari bagian catatan ini jika dibandingkan dengan isi bagian deskriptif ialah kemungkinan dapat ditemukan konsep awal, hipotesis kerja, dan teori (Meloeng, 2006: 212).

#### **e. Penarikan kesimpulan**

Setelah hasil data diperoleh dan dianalisis, itu yang akan dijadikan kesimpulan penelitian.



## BAGAN ALUR PENELITIAN



## **BAB II**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Donor**

Lembaga donor adalah organisasi yang memberikan bantuan dari suatu negara ke negara lain. Para pemberi dana umumnya adalah berasal dari negara-negara “Dunia Pertama”. Dunia Pertama adalah negara-negara yang didominasi oleh “dunia bebas” blok Atlantik, negara-negara Amerika dan Eropa barat (Fauzi, 2005: 1). Biasa juga disebut negara maju. Maju secara politik, sosial, ekonomi maupun teknologi.

Sementara penerima dana adalah negara-negara yang berasal dari Dunia Ketiga. Istilah negara-negara “Dunia Ketiga” bisa diartikan berbagai macam, misalnya negara-negara pasca-kolonial, negara-negara non blok, negara terbelakang, negara-negara belum maju, negara-negara miskin, negara-negara sedang berkembang, kelompok 77 dan sebagainya (Fauzi, 2005: 3). Termasuk salah satu diantaranya adalah negara Indonesia.

Dari sekian banyak lembaga penerima dana dari lembaga donor, Lembaga Sewadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu diantaranya. Ada sekitar 170 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang menerima dana dari lembaga donor internasional (Direktori Peacebuilding Indonesia, 2003: xii). Ini merupakan catatan cukup menarik dan mencengangkan. Bisa dibayangkan banyaknya jumlah lembaga donor internasional yang “berkeliraran” di LSM Indonesia.

Masuknya campur tangan donor asing karena kelompok masyarakat sipil di negara tersebut lemah, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Sehingga tidak mampu menopang dirinya untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Lemahnya masyarakat sipil di Indonesia merupakan salah satu penyebab masuknya lembaga donor internasional dalam proses demokratisasi di Indonesia. (Wijajanto, 2007: 89).

Ada begitu banyak dana dari donatur yang masuk ke LSM dan tak terhitung jumlahnya. Diantaranya adalah donor dari kalangan swasta, masyarakat, lembaga keagamaan, korporat, maupun perorangan. Secara umum lembaga donor dapat dibagi menjadi tiga tipe. *Pertama*, lembaga donor pemerintah. *Kedua*, lembaga donor korporat atau swasta. *Ketiga*, adalah lembaga donor sukarela atau sipil.

*Pertama*, lembaga donor pemerintah. Lembaga donor pemerintah adalah lembaga donor yang mendapatkan uang langsung dari pemerintah yang kemudian dihibahkan kepada negara-negara penerima. Dana dari pemerintah juga diberikan secara langsung pada LSM, baik LSM dalam negeri maupun LSM yang ada diluar negeri pendonor. Bank Dunia (2001/2002) menyatakan ada sekitar 15 persen dari keseluruhan total bantuan yang disalurkan melalui LSM-LSM (Jordan & Tuijl, 2006: 167).

Contoh lembaga donor yang termasuk lembaga donor pemerintah adalah *Department for International Development (DFID)*, *the United Agency for International Development (USAID)*, *Swedish International*

*Development Cooperation Agency (SIDA), Japan International CO-operation Agency (JICA), dan Australian Agency for International Development (AusAID).* Dana-dana dari pemerintah juga disalurkan organisasi-organisasi multilateral seperti Bank Dunia dan PBB (Jordan & Tuijl, 2006: 167).

*Kedua*, lembaga donor korporat atau swasta. Kelompok lembaga donor swasta adalah kelompok lembaga dana yang mandiri. Dananya tidak berasal dari pemerintah. Kelompok ini berada diluar pemerintah. Menurut Widjajanto (2007: 93), lembaga dana swasta atau privat adalah kelompok lembaga donor yang mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan maupun kaum elit negara-negara maju yang memiliki semangat kedermawanaan tinggi. Dana yang diperoleh umumnya dari deviden saham-saham yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara maju.

Ada banyak cara yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing dalam memberikan donasi. Diantaranya adalah sistem donasi bebas pajak atau biasa disebut *Sosial Corporat Resposibility (CSR)*, sistem yayasan, dan sisitem uang karyawan (Jordan & Tuijl, 2006: 168). Contoh dari lembaga donor korporat adalah *Ford Foundation, Operation California, Rockefeller Foundation* dari Amerika Serikat, *HiVOS* dari perusahaan Belanda, *Save the Children Found* dari Inggris, *Open Society* yayasan milik George Soros yang menyalurkan uangnya pada yayasan TIFA, dan ada banyak lagi.

Memang kenyataannya Amerika Serikat adalah negara yang memimpin dalam hal pemberian dana pada negara-negara miskin. Ini bukan merupakan suatu hal yang aneh lagi, karena Amerika Serikat adalah sentral perekonomian dunia. Perputaran uang yang tidak terhingga menyebabkan Amerika Serikat begitu dominan pada sektor ekonomi. Ada sekitar 70.000 yayasan dan 70.000 *Donor Adviser Found* (Dafs) dari Amerika Serikat yang menyalurkan bantuan dana pada negara-negara miskin di Dunia Ketiga (Jordan & Tuijl, 2006: 168).

*Ketiga* atau yang terakhir, kelompok organisasi dana sipil atau sukarela. Menurut Wijajanto (2006: 92), lembaga donor sukarela adalah kelompok yang memperoleh dananya dari simpatisan dan anggota-anggota individual yang memberikan sumbangan secara teratur baik dalam jumlah besar maupun kecil. Ditambahkan oleh Edward, kelompok lembaga dana sipil dapat dipahami sebagai bidang partisipasi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok yang tidak mencari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan-kekuasaan komersial melalui partisipasi itu (Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS, 2006: 167).

LSM-LSM besar banyak yang mengumpulkan dana-dana langsung dari penduduk-penduduk negara mereka. Lembaga donor sipil memberikan dana berjuta-juta dolar pada LSM-LSM. Lembaga donor sipil atau sukarela ditandai dengan semangat kedermawanan yang tinggi. kebanyakan anggota-anggota donor sukarela merupakan aktivis-aktivis sosial. Ini sebagai manifestasi dari kepedulian mereka terhadap

permasalahan-permasalahan yang terjadi dimuka bumi lainnya dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang ada. Misalnya, pada sektor pendidikan penegakan hak masyarakat sipil, keagamaan, serta advokasi-advokasi kepentingan rakyat diberbagai bidang (Widjanto, 2006: 92). Contoh dari lembaga donor sukarela adalah *Catholic Relief Service, Word Vision, Care Incorporated* dari Amerika Serikat dan *Oxford family (Oxfam), War on Want, Cristain Aid* dari Inggris (Hancock, 2007: 12).

## **B. Gambaran Umum LSM di Yogyakarta**

Munculnya LSM di Indonesia relatif berbeda dengan proses munculnya LSM di Eropa dan Amerika. Proses lahirnya masyarakat sipil di Eropa karena kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Sementara di Indonesia tidak hanya atas kesadaran sendiri, namun adanya campur tangan dari pihak luar. Menurut Widjanto (2007: 6), Masyarakat Eropa secara sadar membentuk masyarakat sipil untuk melindungi hak-hak dasarnya dari tindakan-tindakan yang diambil pemerintah. Sementara di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, terjadi karena adanya campur tangan pihak asing. Ada intervensi dari pihak asing dalam pembentukan masyarakat sipil dengan pemberian dana bantuan untuk masyarakat sipil di Indonesia.

Fakih (2010: 37) menambahkan, pertumbuhan jumlah organisasi gerakan sosial di Dunia Ketiga khususnya Indonesia tak lepas dari

keseluruhan sejarah dari diskursus pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa label pembangunan atau yang sering kita sebut dengan *developmentalisme* adalah bentukan dari negara Dunia Pertama, Eropa dan Amerika.

Konsep pembangunan yang diterapkan di kebanyakan negara Dunia Ketiga, mencerminkan paradigma pembangunan model barat. Pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju moderenitas. Moderenitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi. Moderenitas itu sendiri merupakan awal menuju kapitalisme setelah revolusi industri. Pembangunan adalah bagian dari moderenisme yang menuju model kapitalisme lebih lanjut yakni Neokolonialisme (Fauzi, 2005: 5)

Selain ada campur tangan dari pihak asing, kelahiran masyarakat sipil di negara-negara Dunia Ketiga juga tidak lepas dari ujud perlawanan dari masyarakat pedesaan atas kuasa-kuasa yang menindas mereka. Kuasa-kuasa yang menindas ditentang melalui perlawanan yang kolektif dari masyarakat pedesaan. Menurut Fauzi (2005: 14), gerakan-gerakan rakyat pedesaan yang hadir baik dahulu maupun sekarang adalah tantangan-tantangan yang relatif berjelanjutan atas kekuasaan yang menindas golongan-golongan tertentu rakyat pedesaan.

Namun dua dasawarsa terakhir sebagian LSM-LSM di Indonesia telah mengalami pergeseran nilai. LSM-LSM telah mengalami ketidakjelasan dan disorientasi visi, misi, dan posisi LSM itu sendiri. Adanya

kontradiksi antara jargon dan teori kebanyakan LSM besar dengan kenyataan kegiatan mereka dilapangan. Sebagian besar LSM menetapkan cita-cata mereka adalah resmi menuju demokratisasi, transformasi, dan keadilan sosial. Namun, pada kenyataanya ketika mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi dilapangan, banyak dari mereka yang menggunakan konsep maupun teori moderenisme dan developmentalisme tanpa adanya pertanyaan yang kritis (Fakih, 2010: 6).

Pada konteks LSM di Yogyakarta tentu kelahirannya tidak ubahnya seperti lahirnya LSM-LSM lain di Indonesia. Mengingat ada 18 lembaga donor yang menunggangi LSM-LSM di Yogyakarta (Direktori Peacebuilding indonesia, 2003). Tentu bukan mustahil lahirnya LSM-LSM Yogyakarta karena ada faktor campur tangan pihak asing, salah satunya adalah dukungan lembaga donor. Selain itu tentunya kesadaran masyarakat sipil itu sendiri sebagai sikap perlawanan atas ketidak puasanya pada kinerja dari penguasa-penguasa negeri ini.

Ada beberapa LSM Yogyakarta yang menjadi fokus penelitian penulis. *Pertama, Combine Resource Institution (CRI)* atau biasa dilafalkan dengan Combine. LSM yang beralamatkan di Jalan KH. Ali Maksum Sewon, Bantul, Yogyakarta ini bergerak pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pengembangan media komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi, Combine mengharapkan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dapat mempermudah proses pertukaran informasi. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menambah

pengetahuan dengan mengandalkan jaringan media internet (Combine.org.id). LSM Combine juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor Internasional, *Ford Foundation* dan yayasan Tifa.

*Kedua*, Rumah Sinema. Alamat Jalan Menur nomor 18, Baciro, Yogyakarta. Fokus kerja dari LSM ini adalah membangun institusi sosial, politik, dan kultural dalam bidang Film. Kegiatan LSM Rumah Sinema diwujudkan dalam bentuk dokumentasi (film dan foto), penelitian, pelatihan, penerbitan, diskusi serta perpustakaan. Salah satu contoh kegiatan adalah pelatihan pembuatan Film dan Foto bagi masyarakat, pemutaran film disertai dengan diskusi, serta mendirikan perpustakaan komunitas.

*Ketiga*, *Institute for education Development, Social, Religius, and Cultural Stadies* (INFEST). LSM yang mempunyai visi mempercepat demokratisasi Indonesia dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ini beralamatkan di Jalan Veteran Pandean Umbulharjo, Yogyakarta. LSM ini memfokuskan diri pada pendidikan, agama, sosial, dan kebudayaan serta melakukan advokasi pada dan kajian atas hak-hak dasar masyarakat. Salah satu program mereka adalah pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu menembangkan mutu serta kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. LSM Infest juga bekerja sama dengan yayasan Tifa.

*Keempat*, LSM Rifka Anissa. Rifka Anissa adalah organisasi yang didirikan sebagai pengembangan sumber daya untuk membatu kekerasan

terhadap perempuan. LSM ini berdiri semenjak tahun 26 Agustus 1993, serta beralamatkan di Jalan Jambon IV, Komplek Jatimulyo Indah, Kota Yogyakarta. fokus kerja dari LSM ini adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Serta menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan (Rifkaannisa.org.id).

*Kelima*, LSM Kampung Halaman. LSM ini mempunyai fokus kerja dibidang vidio komunitas. Program yang dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan bagi remaja untuk pembuatan film dokumenter. Film dokumenter yang dibuat terkait permasalahan sosial dan budaya. LSM kampung halaman juga bekerja sama pada salah satu lembaga donor dari Amerika Serikat yaitu *Ford Foundation*.

*Keenam*, Aliansi Jurnalisti Indonesia (AJI) Yogyakarta. Pada ujung kekuasaan Orde Baru, tepatnya tanggal 15 Juli 1998 para aktivis LSM, mahasiswa, Akademisi, dan kolumnis melakukan pertemuan terkait pelbagai masalah yang dihadapi pers Indonesia. Setelah melakukan pertemuan itu akhirnya disepakati berdirinya organisasi AJI Yogyakarta. Berdirinya AJI Yogyakarta tidak jauh beda dengan berdirinya AJI Indonesia, yakni sebagai bentuk perlawanan atas kesewenangan-wenangan pemerintahan Orde Baru terhadap pers. Saat ini AJI Yogyakarta giat melakukan pemantauan terhadap kinerja para wartawan-wartawan media massa. Khususnya media massa elektronik dan media massa cetak. Selain

itu, AJI juga giat memperjuangkan hak-hak jurnalis, salah satunya adalah terkait masalah kesejahteraan jurnalis. (AJI.or.id)

*Ketujuh, Indonesian Court Monitoring (ICM).* Lembaga yang berdiri pada tanggal 30 April tahun 2000 ini bergerak di bidang pemantauan peradilan Indonesia khususnya di Yogyakarta. Saat sekarang fokus kerja dari ICM adalah memantau proses peradilan di Yogyakarta. ICM menjadi posko pengawasan peradilan yang bekerja sama dengan komisi Yudisial. Namun kini, ICM tidak lagi bekerja sama dengan lembaga donor asing.

*Kedelapan* atau yang terakhir, Dian Desa. LSM Dian Desa merupakan organisasi yang didirikan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna. LSM yang beralamatkan di Jalan Kaliurang KM. 7 Sleman, Yogyakarta ini juga giat melakukan penelitian, pelatihan serta pendampingan industri kecil untuk masyarakat pedesaan. Selain itu, LSM Dian Desa juga melakukan pelatihan teknologi terkini untuk membantu masyarakat dalam mempermudah pekerjaannya, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencarian mereka melalui pertanian. LSM dian desa menjalin kerjasama dengan banyak donor, diantaranya *Ford Foundation*, Hivos, serta beberapa donor dari negara Jepang.

## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Proses Pengajuan Program**

Program kerja dalam dunia Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering kita lafalkan dengan istilah LSM merupakan hal yang sangat penting. Program kerja mencakup proyek dan kegiatan, kemudian ditawarkan lembaga donor kepada LSM. Zaki Habibi menegaskan, program dalam istilah dunia LSM secara umum terdiri dari beberapa rumusan. Sedangkan proyek dan kegiatan merupakan bagian dari program kerja donor (Zaki Habibi, 17 Agustus 2011).

Dalam proses pengajuan program, lembaga donor menggunakan beberapa cara penyampaian. Ada beberapa cara dalam proses penyampain program kerja. *Pertama*, melalui pengumuman terbuka. *Kedua*, sosialisasi terbatas. *Ketiga*, hubungan langsung.

#### **1. Pengumuman Terbuka**

Pengumuman program kerja secara terbuka adalah hal yang lazim dilakukan oleh lembaga donor kepada LSM. Melalui pengumuman terbuka, LSM-LSM bisa bersaing secara bebas dalam mendapatkan dana dari lembaga donor. Semua LSM, baik yang sudah lama atau besar maupun LSM baru, bebas berkompotisi mendapatkan program kerja dari lembaga donor. Pengumuman terbuka dilakukan dengan beberapa cara yaitu, melalui media massa dan media *online*.

Pengumuman program kerja melalui media massa biasanya dimuat di dalam surat kabar seperti koran. Menurut Budi Hermanto, lembaga donor sering memberikan pengumuman program kerja melalui koran. Setiap LSM yang berminat melakukan kerjasama dengan lembaga donor, bisa langsung membuat proposal kegiatan, selanjutnya diserahkan kepada lembaga donor.

Media *online* juga cara yang sering dilakukan oleh lembaga donor dalam mengumumkan program kerja. Lembaga donor menyediakan *website* yang berisikan pengumuman program-program kerja. Dikatakan oleh Wahyu, bahwa masing-masing lembaga donor mempunyai cara tersendiri dalam mengumumkan program kerja salah satunya melalui *website*.

“Setahu saya, masing-masing lembaga donor memiliki cara sendiri-sendiri. Contoh, yayasan Tifa, mereka setiap tahun membuat pengumuman terbuka lewat *website* Tifa Foundation. Artinya, ini pengumuman terbuka untuk seluruh organisasi masyarakat sipil di Indonesia, bahwa mereka punya program tahun ini. Misalnya untuk HAM, peradilan, keterbukaan informasi publik, ukuntabilitas dan lain-lain. Mereka cantumkan disitu, itu biasanya Februari, kemudian di publis di *website*” (Wahyu, 19 Agustus 2011).

Hal senada juga dikatakan oleh Zamzam. Menurut dia, lembaga donor melakukan penawaran program kerja kepada LSM dengan diumumkan melalui media internet dan koran. Model penawaran program kerja semacam ini juga diiyakan oleh Didin Suhadi. Dia mengatakan, “Tapi kalau ada bidang baru mereka (lembaga donor) umumkan di koran, di web” (Didin Suhadi, 18 Agustus 2011).

Pada pengumuman program kerja terbuka seperti ini, memungkinkan bagi LSM-LSM untuk bersaing. LSM baru maupun LSM lama bebas berkompetisi untuk mendapatkan program kerja. Tentunya persaingan seperti ini sangat *fair* bagi setiap LSM. Penilaiannya akan ditentukan pada proposal kerja yang berkualitas. Kesempatan bagi setiap LSM yang mengajukan proposal untuk mendapatkan program kerja menjadi sama.

Contoh dari pengumuman program secara terbuka adalah lembaga donor Cipta Media. Lembaga donor yang bergerak di bidang media ini mengumumkan secara langsung program-program yang akan mereka danai melalui media *website*. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah mereka buat, LSM manapun boleh mengajukan proposal pengajuan dana pada mereka. LSM yang berminat untuk mendapatkan dana cukup dengan mengakses *website* mereka, maka LSM dengan mudah bisa mendapatkan informasi tentang dana program yang mereka tawarkan. (Ciptamedia.org)

## 2. Sosialisasi Terbatas

Proses penyampain program kerja berikutnya adalah sosialisasi terbatas. Sosialisai terbatas bisa juga disebut pengumuman semi-terbuka. Dikatakan semi-terbuka, karena pengumuman program kerja tidak dilakukan melalui media, melainkan dengan cara mengundang

LSM-LSM tertentu. Lembaga donor secara sepihak mengundang LSM-LSM yang mereka percaya, biasanya LSM-LSM yang sudah pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya.

Budi Hermanto mengatakan, lembaga donor melakukan pengumuman program kerja kepada LSM yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan lembaga donor yang bersangkutan. Namun pengumuman tersebut tidak dilakukan melalui media. Lembaga donor mengundang langsung LSM-LSM yang sudah mereka kenal.

Zamzam mengatakan, bahwa proses penyampain program dari lembaga donor ke LSM dilakukan dengan cara mengundang LSM-LSM melalui surat maupun *email*. LSM-LSM yang diundang oleh lembaga donor biasanya LSM yang sudah mereka kenal dan percaya. LSM yang mereka kenal dan percaya didasarkan atas reputasi LSM yang bersangkutan setelah bekerja sama dengan lembaga donor.

“Ada yang disurati melalui *email* dan ada melalui surat. Kenapa beberapa disurati, sekali lagi reputasi. Jadi, kalau lembaga ini pernah melakukan sesuatu (pekerjaan) kemudian dikenal itu (kemudian) disurati biasanya” (Zamzam, 9 Agustus 2011).

Menurut Bambang, pengumuman terbatas dalam dunia LSM dikenal dengan istilah *call for proposal*. Lembaga donor mengundang LSM-LSM untuk mengajukan proposal terkait dengan tema-tema yang sudah mereka tentukan. Kemudian proposal akan diseleksi dan selanjutnya dipilih proposal yang paling *desibel* atau sesuai dengan ketentuan donor.

Contoh dari sosialisasi terbatas adalah ketika yayasan lembaga donor Tifa mendanai program kerja Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tifa menghubungi beberapa Universitas yang ada di Yogyakarta, salah satunya Universitas Islam Indonesia. Kemudian dengan berbagai pertimbangan dan alasan, yayasan lembaga donor Tifa menjatuhkan pilihannya pada Universitas Islam Indonesia untuk menjalankan program KIP tersebut.

### **3. Hubungan Langsung**

Pengajuan program kerja yang terakhir adalah hubungan langsung antara lembaga donor dan LSM. Hubungan langsung ini didasarkan atas pertemanan dan kepercayaan antara lembaga donor dan LSM. LSM dan lembaga donor sudah sangat dekat dan sering melakukan kerjasama program. Jadi, memungkinkan untuk berhubungan secara langsung untuk penggarapan program kerja.

Dalam proses hubungan langsung ini ada dua cara yang dilakukan. *Pertama*, lembaga donor menunjuk langsung satu LSM yang sudah dipercaya untuk menjalankan program kerja. *Kedua*, LSM mengajukan proposal kerja atau melobi lembaga donor.

#### **a. Penunjukan Langsung oleh Lembaga Donor**

Penunjukan program kerja secara langsung oleh lembaga donor kepada LSM didasarkan pada reputasi dari LSM yang

bersangkutan. Menurut Bambang, lembaga donor lebih memilih menyalurkan program kerja kepada LSM yang sudah pernah berhubungan dengan lembaga donor sebelumnya dibandingkan dengan LSM baru. Lembaga donor terkadang enggan berhubungan dengan LSM baru, karena lembaga donor belum mengetahui reputasi dari LSM tersebut. Beda halnya dengan LSM yang sudah lama dan pernah berhubungan dengan lembaga donor, mereka akan lebih percaya, karena sudah tahu reputasi LSM yang bersangkutan.

Ditegaskan juga oleh Didin Suhadi, lembaga donor kerap kali menawarkan program kerja kepada LSM yang sudah mereka kenal dan sudah lama menjalin kerjasama. Lembaga donor memiliki langganan untuk penyaluran program kerja. LSM yang mereka tawarkan program kerja adalah LSM yang mempunyai kemauan untuk mengerjakan program kerja lembaga donor. Lembaga donor juga membutuhkan tempat penyaluran uang. Salah satu caranya adalah mencari LSM yang mau di ajak kerja sama untuk menjalankan program kerja lembaga donor.

Wahyu juga mengatakan pernyataan yang sama. Menurut Wahyu, setiap lembaga donor memiliki langganan dalam proses penyaluran program kerja. Langganan didasarkan atas kepercayaan. Lembaga donor memilih individu dari LSM yang di pandang integritas.

LSM besar memiliki peluang jauh lebih besar untuk mendapatkan program kerja dari lembaga donor dibandingkan LSM yang baru. Zaki Habibi mengatakan, LSM besar dan sudah dikenal akan mendapat peluang jauh lebih besar untuk mendapat program kerja.

“Kalau yang udah besar (LSM) dan sudah dikenal biasanya langsung. Biasanya yang menghubungi adalah *project officer* dari fundingsnya, sesuai dengan isu yang mau dikerjakan. Jadi, HIVOS itu ada PO bidang kebudayaan, PO bidang HAM. PO disini maksudnya staf *funding* yang punya *grant/dana*” (Zaki Habibi, 28 Juli 2011).

Cara yang sering digunakan dalam penunjukan langsung adalah dengan cara pertemuan antara perwakilan lembaga donor dan LSM terkait. Biasanya LSM akan mengundang aktivis dari LSM yang akan menjadi penerima dana program kerja. Menurut Masduki, perwakilan dari lembaga donor akan mengadakan pertemuan dengan LSM yang dinilai kompeten.

Bambang Mujiyanto mencontohkan, lembaga donor asing sering mengontak langsung AJI dalam penggarapan program kerja langsung. Ketika memperingati hari kemerdekaan pers, lembaga donor asing lebih memilih AJI untuk penggarapan program kerja karena kesamaan visi dan misi. Lembaga donor menilai AJI lebih menegakan kode etik jurnalistik dibanding PWI.

## **b. LSM Lobi Lembaga Donor**

Dalam proses pengajuan program tidak selalu lembaga donor yang menghubungi LSM. LSM juga aktif dalam menentukan program kerja. Cara ini memang tidak lazim bagi sebagian LSM, namun bagi LSM yang besar dan sudah dipercaya hal seperti ini kerap dilakukan.

Budi Hermanto menjelaskan, bahwa LSM juga sering melobi lembaga donor dalam usaha mendapatkan program kerja. LSM akan mengajukan proposal program kerja kepada lembaga donor. Kemudian lembaga donor akan menilai proposal program kerja yang diajukan.

“LSM membuat proposal,(kemudian) melobi lembaga donor (untuk) mengajukan proposalnya ke lembaga donor. Karena proposalnya bagus, inovatif, bisa dipertanggungjawabkan. Karena proposalnya bagus, bisa diterima, ya sudah kemudian dibiayai” (Budi Hermanto, 31 Juli 2011).

## **B. Alasan/Pertimbangan Pemberian Dana**

Ada banyak alasan dan pertimbangan lembaga donor saat memberikan dana kepada LSM. Lembaga donor dalam memilih LSM yang akan menerima dana tidak semata-merta menyerahkan dana begitu saja. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang melandasi pemberian dana dari lembaga donor ke LSM. Lembaga donor akan memberikan dana

dengan pertimbangan dan alasan berupa kepercayaan, pertemanan dan rekomendasi.

## 1. Kepercayaan

Di antara sekian banyak alasan dan pertimbangan pemberian dana oleh lembaga donor kepada LSM, kepercayaan menjadi salah satu yang utama dan sangat menentukan. Kepercayaan tersebut didasarkan atas beberapa syarat. *Pertama*, kinerja dan reputasi dari LSM. *Kedua*, kapasitas lembaga. *Ketiga*, popularitas dari individu dalam suatu LSM.

### a. Kinerja dan Reputasi

Kinerja LSM menjadi prasyarat pertama dalam pertimbangan pemberian kepercayaan oleh donatur. Kinerja LSM akan menentukan tingkat kepercayaan dari lembaga donor. Lembaga donor akan percaya kepada LSM tertentu apabila hasil kerja yang diberikan kepada LSM dinilai baik oleh lembaga donor.

Ibad mengatakan banyak proposal LSM ditolak akibat dari kinerja LSM dinilai jelek oleh lembaga donor, karena kinerja sebelumnya akan menjadi alat ukur bagi lembaga donor dalam pemberian kembali program kerja berikutnya. Jadi, bila kinerja LSM dinilai buruk oleh suatu lembaga donor, maka LSM tersebut akan sulit untuk mendapatkan program kerja kembali pada lembaga donor yang sama.

“Banyak lembaga besar yang proposalnya ditolak. Karena proposal itu penting untuk mengukur maksud seseorang secara penuh seperti dari keinginan dan hasilnya yang ingin dicapai. Jadi, ketika lembaga donor sudah mempercayai suatu lembaga biasanya diteruskan dengan melakukan hal lain. Tapi basisnya adalah ketika lembaga donor menilai LSM itu mampu. Dari pada mencari lembaga baru yang belum saya (lembaga donor) tahu dan kualitasnya juga belum diketahui. Kepercayaan seperti itu muncul karena ada kualitas kerja. Bagaimanapun lembaga donor itu selalu ada mekanisme evaluasi” ( Ibad, 25 Juli 2011).

Profesionalitas kinerja organisasi juga akan menjadi alat ukur kepercayaan bagi donatur. Lebih jauh Budi Hermanto menambahkan, profesionalitas organisasi dapat dinilai dalam mengelola keuangan, hal itu akan berimplikasi pada kepercayaan. Donatur akan lebih percaya pada LSM yang mampu mengelola uang dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Didin Suhadi dan Momon Hermansyah juga berpendapat sama. Kepercayaan dari donatur didasarkan atas kualitas kerja LSM. Kinerja yang bagus akan seiring dengan kepercayaan dari lembaga donor. Bila kualitas kerja bagus, maka kepercayaan juga bagus. Lembaga donor akan lebih memilih partner yang kualitas kerjanya bagus.

Sementara itu reputasi dan kinerja saling terkait satu sama lain. kinerja dari LSM akan mempengaruhi reputasi dari LSM itu sendiri. Bila kinerja LSM bagus, sesuai dengan harapan donor, maka reputasi dari LSM tersebut akan dinilai baik oleh lembaga donor. Sebaliknya, jika kinerja yang dihasilkan LSM tersebut

tidak sesuai dengan harapan lembaga donor, maka akan sulit sekali bagi LSM meraih kepercayaan dari lembaga donor.

Menurut Budi Hemanto, prasyarat dari kepercayaan adalah reputasi. Dasar dari reputasi adalah ketika LSM mampu mempertanggung jawabkan pekerjaannya, mengelola serta mengaudit keuangan dengan baik.

“Sebelum ngomongin kepercayaan, pertama, prasyaratnya tentu lembaga (LSM) itu reputasinya harus bagus. Reputasi itu ngomongin transparansi dan akuntabilitasnya bagus. Maksudnya kalo manajemen pengelolaan uangnya bagaimana, kalo masih tradisional dan tidak bisa dipertanggung jawabkan donornya tidak mau memberi, kan gitu. Kalo laporan pertanggung jawabannya keuangannya bagus, di audit, di laporkan ke publik, akuntabelah intinya, Itu menjadi ukuran” (Budi Hermanto, 31 Juli 2011).

Reputasi yang dinilai oleh lembaga donor ada dua, yakni berupa reputasi perorangan dan reputasi LSM sebagai suatu organisasi. Pertama, reputasi perorangan. Reputasi perorangan disini maksudnya adalah orang atau individu yang bekerja di suatu LSM. Orang yang dinilai kredibel oleh lembaga donor. Biasanya orang tersebut adalah pendiri atau petinggi dari LSM.

Menurut Zamzam, reputasi perorangan dapat terbentuk karena kinerja individu dari salah seorang pekerja LSM dinilai baik oleh lembaga donor. Salah satu ukuran dari reputasi Individu adalah memiliki karya dan dedikasi pada LSM dan masyarakat. Sehingga kapasitas dari individu tersebut sudah sangat dipercaya oleh lembaga donor. Dia mencontohkan, reputasi dari Romo

Mangun. Romo Mangun adalah salah satu orang yang sangat dipercaya oleh lembaga donor. Hal ini atas dasar karya dan dedikasi Romo Mangun yang luar biasa. Bahkan tidak jarang lembaga donor yang menawarkan program kerja pada Romo Mangun.

Perkataan tersebut di atas juga diamini oleh Bambang Mujiyanto. Dia mengatakan, reputasi dari individu dapat dijadikan alat untuk mendapatkan dana. Banyak LSM baru yang bermunculan, namun orang yang mendirikanannya adalah orang yang sudah lama bekerja di dunia LSM. Karena reputasi dari individu tersebut bagus, maka lembaga donor tidak sungkan mempercayakan dananya pada LSM tersebut. Ditambahkan oleh Didin Suhadi, bahwa semua LSM baru yang berdiri di Yogyakarta adalah dibentuk oleh orang-orang lama LSM. Artinya, walaupun LSM tersebut baru, namun orang yang mendirikanannya adalah orang lama.

Kedua, reputasi LSM sebagai organisasi. Baik buruknya reputasi dari suatu LSM dapat dinilai dari hasil yang dicapai dan profesionalitas LSM dalam menjalankan program kerja. Menurut Budi Hermanto, kinerja LSM akan dinilai oleh donatur melalui *output* atau sesuatu yang dihasilkan dari suatu program kegiatan. Dia mencontohkan, program pemberdayaan petani. Penilaian berupa, apakah petani tersebut berdaya apa tidak. Jika petani

tersebut berdaya berarti programnya berhasil, sebaliknya jika petani tersebut gagal dalam panen maka program tersebut gagal. Berdaya disini maksudnya adalah petani mampu mengolah sendiri kebun atau tanah pertanian mereka dengan baik.

Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh Ibad. Dia mengatakan, tingkat kepercayaan dari lembaga donor menyandarkan pada kualitas *output* kerja sebelumnya dari LSM. Lembaga donor akan menanyakan kualitas kerja suatu LSM kepada lembaga donor lainnya yang sudah pernah menjalin kerjasama sebelumnya. Penilaian berupa kualitas kerja, pengelolaan program, hasil kerja, dan pengerjaan program dari suatu LSM.

#### **b. Kapasitas Lembaga**

Kapasitas kelembagaan suatu LSM juga menentukan dalam proses kepercayaan. Lembaga donor akan memilih LSM yang memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai. Kapasitas LSM secara kelembagaan dibagi menjadi dua. *Pertama*, LSM harus berbadan hukum. LSM wajib memiliki badan hukum yang memadai layaknya organisasi profesional. Lembaga donor akan mempercayai LSM yang memiliki badan hukum jelas.

Ibad menjelaskan, LSM wajib memenuhi persyaratan-persyaratan formal untuk mendapatkan dana dari lembaga donor.

Persyaratan formal tersebut salah satunya adalah LSM harus memiliki badan hukum. Karena proses donasi dari lembaga donor menyertakan beban-beban hukum.

“Mereka (lembaga donor) pasti akan melihat kapasitas keorganisasian, apakah organisasi ini memiliki syarat-syarat formal mencukupi, karena proses donasi itu juga menyertakan beban-beban hukum. Karena ada MOU, ada kesepakatan yang disepakati yang mempunyai implikasi hukum”(Ibad, 25 juli 2011).

Pernyataan tersebut juga diamini oleh Kurniawan. Menurut dia, LSM harus memiliki syarat-syarat formalitas kelembagaan untuk meraih kepercayaan dari lembaga donor. LSM wajib memiliki dokumen-dokumen hukum. Penting bagi LSM memiliki badan hukum, karena lembaga donor dalam memilih LSM akan melihat kejelasan hukum dari suatu lembaga.

*Kedua*, kapasitas keorganisasian. LSM wajib memiliki anggaran dasar rumah tangga yang jelas. Selain itu, LSM juga harus mampu membuat proposal kerja yang memadai. Akan sulit bagi LSM untuk mendapatkan dana dari donor bila LSM tersebut tidak mampu untuk membuat proposal sesuai ketentuan donor.

Menurut Bambang, selain memiliki badan hukum. LSM juga harus memiliki struktur organisasi yang memadai. Menyertakan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) yang jelas. Mampu membuat proposal yang desibel seperti layaknya organisasi profesional. Itu semua akan menjadi alat pertimbangan

yang kuat dalam meraih dana dan program kerja dari lembaga donor.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibad. Menurut dia, untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor, LSM harus memiliki syarat-syarat keorganisasian. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan SDM yang memadai. Roswati Handayani juga menyebutkan hal serupa. LSM harus mampu membuat proposal secara baik dan benar. Proposal harus sesuai dengan ketentuan lembaga donor. Karena yang menilai baik buruknya proposal kerja adalah lembaga donor.

Semua kapasitas lembaga disebutkan diatas menjadi salah satu pertimbangan pemberian dana oleh lembaga donor, karena lembaga donor selaku pemberi dana memiliki kultur kerja berbasis dokumen. Menurut Zaki Habibi, sistem kerja dari lembaga donor adalah *document based*. Artinya, dokumen itu penting dan menjadi tolak ukur pekerjaan LSM oleh lembaga donor. Salah satu bentuk dokumen adalah proposal kerja yang diajukan oleh LSM.

“Jadi, kultur di NGO dan *funding* adalah *docement based*. Artinya *dokument based* itu penting dan menjadi ukuran. Segalah hal harus ada *document based* itu ya. Proposal menjadi salah satu bentuk *document based* (berbasis dokumen). Kerjanya memang dokumen” (Zaki Habibi, 29 Juli 2011).

### **c. Popularitas**

Pada dasarnya popularitas tidak terlalu signifikan dalam membentuk kepercayaan. Namun ada sebagian LSM yang menggunakan cara ini. LSM kerap mendompleng nama besar seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor. Menjadikan nama besar sebagai “umpan” untuk mendapatkan dana ini disebut syarat kepercayaan dari segi popularitas seseorang.

Ibad mengatakan, bahwa ada sebagian LSM mempunyai kebiasaan mencari nama besar seseorang. Orang tersebut biasanya adalah orang yang terkenal atau setidaknya dikenal masyarakat ataupun lembaga donor. Sehingga orang ”besar” tersebut akan dijadikan “penyangga” untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor.

“Kemudian ada satu model, ini kebiasaan banyak lembaga. Mencari nama besar, misalnya, anda orang terkenal orang terpercaya, anda saya jadikan dewan penasehat. Ini menjadi penyangga kepercayaan itu. Itu terjadi, itu fakta” (Ibad, 25 Juli 2011).

## **2. Pertemanan dan Rekomendasi**

Walaupun tidak terlalu signifikan, pertemanan juga hal yang dipertimbangkan dalam pemberian dana. Salah satu faktor lahirnya hubungan pertemanan antara LSM dan lembaga donor adalah rekomendasi. Baik itu rekomendasi dari LSM maupun rekomendasi yang diminta lembaga donor. LSM pemula yang ingin mencari dana

program kerja akan meminta rekomendasi dari LSM yang sudah pernah mendapatkan dana dari lembaga donor.

Sebaliknya, lembaga donor juga akan meminta kepada LSM yang sudah mereka kenal untuk dicarikan LSM baru yang sanggup mengerjakan program kerja mereka. Faktor yang lain adalah *track record* dari LSM. Lembaga donor akan melihat *track record* dari LSM, kemudian diikuti dengan terjalinnya pertemanan antara lembaga donor dan LSM.

**a. Rekomendasi**

Rekomendasi dan pertemanan pada dunia LSM sangat erat kaitannya. Biasanya berawal dari rekomendasi, pertemanan antara LSM dan lembaga donor terjalin. Lembaga donor kerap kali meminta pada LSM atau orang dari LSM yang sudah mereka kenal untuk mencari LSM untuk kepentingan pengerjaan program kerja. Begitu juga dengan LSM, sering kali LSM baru meminta rekomendasi kepada LSM lama untuk memperkenalkan mereka dengan lembaga donor.

Ibad mengatakan ada sebagian donor yang meminta dicarikan LSM yang mau mengerjakan program kerja mereka. Jadi, lembaga donor menitipkan pesan kepada orang ketiga yang kemudian mencarikan LSM yang bisa diajak kerjasama. Hal senanda juga disampaikan oleh Kurniawan. Menurut dia pihak

donor sering mencari LSM untuk menjalankan program kerja dengan bantuan pihak ketiga.

“Yang lebih banyak dilakukan adalah orang dari donor ini tanya ke orang (LSM) yang mereka kenal. Kalo dia kenal nama baru (LSM), menurutmu ini (LSM baru) ini bagaimana, kan gitu. Yang saya tau sendiri donor banya meminta rekomendasi dari LSM yang udah pernah dapat dana dari dia. Itu untuk menilai dia pantas untuk dikasih dana. Itu bagus dan bisa menjadi tidak bagus, ya kalau dia tidak bagus iya ini menjadi kroni-kroni yang tidak bagus” (Kurniawan, 3 Agustus 2011).

LSM juga acap kali meminta rekomendasi dari LSM yang sudah berhubungan dengan lembaga donor. Biasanya yang melakukan ini adalah LSM baru yang ingin mendapatkan dana dari lembaga donor. LSM baru akan meminta LSM yang sudah dikenal lembaga donor untuk merekomendasikan dia sebagai penerima dana.

Roswati Handayani menegaskan, LSM baru akan menggandeng LSM lama yang sudah pernah menjalin kerja sama dengan lembaga donor. LSM baru akan meminta direkomendasikan kepada pihak donatur untuk diberi dana. Ditambahkan lagi olehnya, bahwa pihak donor akan meminta jaminan kepada LSM lama terkait masalah kinerja dari LSM baru penerima dana tersebut.

“Ya LSM baru ada rekomendatornya, biasanya gitu. Teman-teman yang baru punya LSM, mereka mencari dana, biasanya dia akan menggandeng teman-teman yang sudah dikenal oleh lembaga dana, ada remendatornya. “mbak mbok saya dikasih rekomendasinya”, nanti lembaga (donor) akan tanya ke rekomendator ini” (Siti Roswati, 18 Agustus 2011).

Hal senada juga disampaikan oleh Yosi. LSM baru akan meminta dikenalkan kepada *project officer* dari pihak lembaga donor. *Project officer* juga ingin menjalin kerjasama sebanyak mungkin dengan lembaga donor. Jadi, LSM lama akan memperkenalkan LSM yang baru pada *project officer* lembaga donor.

#### a. **Pertemanan**

Tidak selamanya pertemanan menjadi tolak ukur dalam pemberian dana antara LSM dengan lembaga donor. Hal ini diungkapkan oleh Zaki Habibi, mengingat hubungan pertemanan sifatnya relatif. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari orang dari lembaga donor dan LSM bisa saja berteman, tapi tidak dalam hubungan pekerjaan. Poin terpenting adalah *track record* dari LSM.

“Pertemanan, tidak selalu dan relatif. Banyak sesama orang LSM kenal dalam hubungan bertemanan tapi tidak dalam hal kerja. Yang terpenting adalah *track record*. Rekomendasi biasanya formalitas” (Zaki Habibi, 29 Juli 2011).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Budi Hermanto. Menurutnya pertemanan pada proses pemberian kepercayaan tidak terlalu signifikan. Namun pertemanan bisa saja dijadikan titik berangkat menuju kepercayaan. LSM yang dikenal oleh lembaga donor akan lebih mudah mengakses dana dan program kerja.

Dia menambahkan, biasanya hubungan pertemanan disini terjalin karena lembaga donor mengetahui *track record* dari LSM. *Track record* LSM sebagai sebuah lembaga atau *track record* secara individu yang berkerja untuk LSM. Kemudian pertemanan ini menjadi titi tolak untuk meraih kepercayaan dari lembaga donor. Jadi, pertemanan antara lembaga donor dan LSM terjalin karena lembaga donor mengetahui *track record* dari LSM, kemudian dari pertemanan ini melahirkan kepercayaan.

“Faktor yang lain adalah soal kepercayaan. Saya yang sudah dikenal, karena aku lebih punya pengalaman, maka aku lebih mendapatkan prioritas, karena mereka tahu persis *track record* aku”. (Budi Hermanto, 31 Agustus 2011).

### C. Proses Penentuan Isu

Penentuan isu program dalam dunia LSM dilakukan dengan banyak cara. Lembaga donor maupun pihak LSM sama-sama bisa menentukan isu program. Namun memang dalam prakteknya lembaga donor jauh lebih dominan dalam menentukan isu. Hal ini karena lembaga donor yang memiliki dana untuk program kerja LSM. Sementara hanya sebagian kecil LSM yang bisa mengajukan isu kepada donor. Biasanya LSM yang bisa mengajukan isu adalah LSM yang sudah besar dan dipercaya oleh lembaga donor.

Ketika menentukan isu, baik lembaga donor maupun LSM hanya bekerja untuk isu-isu yang sedang *trend* di masyarakat. Menurut Zaki

Habibi, biasanya Lembaga donor hanya bekerja untuk isu-isu yang sedang *trend*. Sementara LSM seringkali mencocokkan isu mereka dengan isu yang sedang *trend* tersebut. LSM maupun Lembaga donor bekerja hanya untuk isu-isu besar saja.

Untuk lebih jelas, penulis membagi cara-cara dalam proses penentuan isu. Ada beberapa cara dalam proses penentuan isu. *Pertama*, lembaga donor mewacanakan isu. *Kedua*, LSM yang mengusulkan atau mewacanakan isu. *Ketiga*, lembaga donor mengarahkan isu. *Keempat*, keadaan tidak terduga di suatu masyarakat.

### **1. Mewacanakan Isu**

Proses penentuan isu melalui pewacanaan adalah cara yang sering dipakai oleh lembaga donor. Mewacanakan isu sepintas agak mirip dengan mengarahkan. Namun proses pengarahannya tidak dilakukan secara eksplisit. Pewacanaan isu oleh lembaga donor dilakukan dengan sangat sistematis., yang kemudian sangat susah dimengerti oleh LSM. Sementara pihak LSM hanya akan mencocokkan atau mengait-ngaitkan isu mereka dengan isu yang dibawa oleh lembaga donor.

Zaki Habibi menjelaskan proses pewacanaan isu oleh lembaga donor dengan cukup jelas. Menurut dia, lembaga donor seringkali menggunakan upaya sistematis dalam menentukan isu. Isu itu dibangun melalui pewacanaan atau diskursus tertentu yang cenderung

sepihak. Pola seperti ini sangat abstrak dan terkadang susah dipahami oleh pihak LSM. Jadi, bahasa sederhananya adalah seolah-olah LSM bebas namun pada kenyataannya didikte atau diarahkan.

“Pada Praktiknya, ada hubungan tidak berimbang antara lembaga Donor dan LSM dalam hal ketimpangan infrastruktur, pemahaman isu, dan kapasitas LSM. Sehingga pola-pola hubungan yang terbentuk masih tetap bersifat *top-down* meskipun tidak serta-merta melalui pendiktean program. Bentuknya biasanya melalui training-training yang non-partisipatoris yang diadakan lembaga donor dan harus diikuti oleh staf LSM sebelum dan selama kerjasama program berlangsung. Patut dicatat, tidak semua training atau pelatihan bersifat “mengarahkan” program. Pelatihan yang saya kategorikan di sini adalah yang non-partisipatoris alias tidak membuka kesempatan atau keterlibatan aktif dari sudut pandang peserta (staf LSM). Dari sinilah bentuk-bentuk penanaman diskursus yang cenderung “mengarahkan” tadi dibentuk” (Zaki Habibi, 17 agustus 2011).

Isu yang di wacanakan lembaga donor dengan sendirinya akan diikuti oleh LSM. Mencocokkan atau mengait-ngaitkan isu adalah cara yang dipakai LSM. Menurut Budi Hermanto, setiap LSM punya visi, misi, *plat form* atau fokus kerja masing-masing. LSM akan mengajukan proposal kerja sesuai dengan isu utama yang dimiliki oleh lembaga donor. hal ini dicontohkan oleh Zaki Habibi, misalnya isu utamanya adalah demokratisasi. *Ford* untuk demokratisasi. Tidak semua LSM akan sama, jadi tergantung jenis produknya LSM masing-masing. Misalnya Combine, mungkin demokratisasi melalui keterbukaan informasi. Impulse membahas tentang demokratisasi tapi lebih pada soal Hak Azasi Manusia (HAM), karena ngomongin multikulturalisme.

Ditegaskan oleh Kurniawan, bahwa pewacanaan isu oleh lembaga donor tidak terlalu deterministik. Maksudnya, setiap LSM bebas menentukan isu yang ingin diangkat. Lembaga donor hanya mewacanakan atau menentukan isunya saja. Tidak ada keharusan bagi setiap LSM untuk mengikuti isu dari lembaga donor.

Misalnya, Tifa mengangkat isu keterbukaan informasi publik. Kemudian Tifa bekerjasama dengan Impulse dalam melaksanakan program kerja. Impulse mengadakan kegiatan bedah buku Ruang Publik bersama Budi Hardiman. Pada sesi kegiatan bedah buku tersebut tentu akan dibahas terkait masyarakat terbuka. Tentunya semua itu sesuai dengan apa yang diinginkan *open society*, lembaga donor milik George Soros yang mengusung visi dan misi masyarakat yang terbuka.

## 2. LSM Mengusulkan/Mewacanakan Isu

Tidak hanya lembaga donor yang bisa mewacanakan isu. LSM selaku penerima dana juga sering mengusulkan isu pada lembaga donor. LSM mengajukan proposal kerja kepada lembaga donor sesuai dengan isu bentukan mereka. Tentunya LSM yang sering dan bisa mewacanakan isu adalah LSM besar atau sudah dipercaya oleh lembaga donor.

Zaki Habibi menjelaskan, isu juga kenal *trend*. Lembaga donor juga mengikuti *trend* isu yang sedang terjadi dimasyarakat. Kondisi

masyarakat tempat program yang akan dijalankan juga menentukan isu. Jadi, secara tidak langsung LSM juga punya peran menentukan isu. LSM juga bisa menggiring isu yang kemudian di ajukan ke lembaga donor.

Dicontohkan oleh Zaki Habibi, misalnya sewaktu kejadian Tsunami Aceh 2004. Banyak lembaga donor yang tidak ada hubungannya dengan kebencanaan mencoba mengait-ngaitkan program mereka dengan isu bencana. Contoh HIVOS, dulunya tidak punya *core* atau inti isu dibidang kebencanaan, tapi pada stunami Aceh dan setelahnya, HIVOS membangun lini/depertemen khusus di isu ini. Dan menyediakan *Grant-Grant* untuk program NGO yang berhubungan dengan kebencanaan (Zaki Habibi,29 Juli 2011).

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahyu, menurut dia LSM juga punya hak untuk mengajukan program. Program yang diajukan harus sesuai dengan visi dan misi LSM. Varian-varian program mereka tidak bertentangan dengan fokus kerja LSM. Misalnya, Combine mempunyai fokus kerja keterbukaan informasi publik. Kemudian lembaga donor melihat *trend* isu di Indonesia adalah demokrasi. Lalu ada proses pencocokan kerja yang dilakukan oleh donatur. Combine selaku LSM yang fokus kerjanya keterbukaan informasi publik bisa mengarahkan isu sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat. Kondisi dari masyarakat bisa menentukan proses pembentukan isu.

Menurut Ibad, selama LSM tegas dengan *cord* atau fokus kerja, tidak akan mungkin LSM akan selalu mengikuti isu lembaga donor. LSM juga punya hak untuk megusulkan isu yang dibentuk. Karena menurut Kurniawan, LSM jauh lebih tahu apa yang sedang menjadi masalah publik sekitarnya. LSM lebih tahu apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga donor. Karena LSM adalah organisasi yang paling dekat dan paham dengan kondisi masyarakat.

### 3. Mengarahkan Isu

Keberlangsungan hidup LSM terkadang bergantung pada lembaga donor. Banyak LSM di Indonesia menggantungkan hidupnya pada lembaga donor. Ketika lembaga donor tidak memberikan dana pada LSM, maka dengan sendirinya LSM tersebut akan “gulung tikar”. Menurut Ibad, banyak LSM yang “gulung tikar” akibat sumber dana yang tunggal. LSM hidup dari hanya dari uang donor. Sehingga pada saat lembaga donor beralih isu, fokus isu LSM juga berubah.

Ketergantungan LSM ini adalah penyebab dari leluasanya lembaga donor mengarahkan atau mendikte proses pembentukan isu. Zaki Habibi menjelaskan, mengarahkan atau mengatur maksudnya adalah capaian akhir atau hasil akhir sudah di desain oleh lembaga donor.

“mengatur atau mendikte, seperti dalam contoh lembaga donor (*funding agency*) yang mengatur dan mendikte program-program LSM penerima grant atau dana dari *funding* tersebut. Artinya, agenda besar dan capaian yang akan diraih (*outcome*) atau hasil akhir program (*goal*) sudah didesain oleh *funding*. LSM tinggal menerjemahkan program ke dalam berbagai kegiatan yang arahnya seperti desain besar dari *funding*” (Zaki Habibi, 17 Agustus 2011).

Sebab lain dari pengarahannya ini adalah lemahnya prinsip dari suatu LSM. Banyak LSM yang tidak konsisten dengan fokus kerja mereka. Menurut Ibad, ada LSM yang lunak pada *cord* mereka dan tidak konsisten dengan fokus kerja mereka. Jadi, perubahan cara berfikir LSM tergantung pada cara berfikir lembaga donor.

Ditambahkan oleh Zaki Habibi, ada sejumlah LSM, terutama yang bersekala relatif lokal yang menyusun program kerja sekaligus struktur organisasinya berdasarkan skema *grant* atau dana dari lembaga donor. Penyusunan struktur organisasi tersebut untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu program berakhir, maka program dan struktur organisasi LSM tersebut berubah. LSM mengikuti *grant* berikutnya baik dari lembaga donor yang sama ataupun berbeda.

Disebut sebagai “berbasis *funding*” adalah ketika perubahan pola dan struktur LSM ini dijalankan demi menyamakan dengan agenda lembaga donor tersebut tanpa menguji secara komprehensif kebutuhan riil masyarakat sasaran. Dicontohkan oleh Zaki Habibi, LSM A semula memiliki agenda besar rekonsiliasi stigmatisasi komunisme di wilayah tertentu dengan prioritas lebih pada pengentasan kemiskinan. Tetapi, karena dana yang datang dan tersedia saat ini lebih ke soal lain, maka LSM A tidak memiliki kekuatan atau *power* untuk menegosiasikan arah kerjasama ini. Bahasa mudahnya, LSM A yang seharusnya juga mengusung agenda besar tersebut, rela meluruskannya demi agenda lembaga donor yang bisa jadi belum

tentu sesuai atau belum tentu menjadi prioritas masyarakat sasaran saat itu.

#### **4. Kejadian Tak Terduga**

Kejadian tak terduga juga merupakan salah satu penyebab dari terbentuknya isu dalam dunia kerja LSM. Kejadian tak terduga ini biasanya disebabkan oleh kejadian alam. Bencana alam akan dapat mengundang animo lembaga donor untuk menyalurkan bantuannya. Menurut Zaki Habibi, contoh nyata dari munculnya isu akibat kejadian tak terduga adalah ketika gempa Yogyakarta 2006 silam.

Zaki Habibi menjelaskan, pada pasca gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 banyak lembaga donor berdatangan memberikan bantuan. Lembaga berlomba-lomba untuk memberi bantuan. Tidak ada lagi fokus kerja yang jelas dari setiap lembaga donor. Bahkan lembaga donor yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebencanaan turut menyalurkan bantuan.

Jadi, kejadian tak terduga seperti bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006 turut menentukan proses pembentukan isu. Namun menurut Didin Suhadi, seringkali kejadian seperti ini seras akan kepentingan. Lembaga donor memanfaatkan kejadian ini untuk mencari popularitas. Citra lembaga donor akan dipandang bagus oleh para pemberi dana, karena biasanya semua mata masyarakat dunia akan tertuju pada lembaga “baik” ini.

#### **D. Proses Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi atau yang sering disingkat dengan monev, adalah kerja akhir dari setiap program kerja di dunia LSM. Monitoring adalah pemantauan dari setiap program kerja yang sedang berjalan. Evaluasi adalah usulan-usulan perbaikan terhadap program yang telah dijalankan. Namun biasanya proses monitoring dan evaluasi akan dikerjakan secara bersamaan. Monitoring dan evaluasi penting bagi LSM. Ini untuk mengukur efektifitas kerja LSM dalam menjalankan program kerja.

Semua kegiatan yang berhubungan dengan program kerja akan dimonitoring dan evaluasi. Mulai dari hasil kerja hingga segala sesuatu yang terkait dengan administrasi. Hasil berupa semua yang didapat atau capaian dari program kerja. Sementara administrasi adalah kesesuaian antara proposal kerja dengan program yang dijalankan. Biasanya lebih pada dana atau uang untuk menjalankan program.

LSM maupun lembaga donor sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, ada pihak independen diluar dari LSM dan lembaga donor yang melakukan monev. Hal ini di perkuat oleh komentar zaki. Dia mengatakan “namanya itu monitoring dan evaluation (monev), jadi, NGO melakukan monev internal dan *funding* juga melakukan monev internal. Biasanya dua kali setiap masa proyek (ditengah dan diakhir

program). Lalu ada juga monev yang melibatkan tim independent (diluar *funding* dan di luar NGO yang bekerja). (Zaki Habibi, 29 Juli 2011)

Monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk membangun kepercayaan antara LSM dan lembaga donor. Pekerjaan LSM akan dipercaya jika LSM tersebut melakukan proses monitoring dan evaluasi. Kepercayaan tersebut tentunya tidak hanya datang dari lembaga donor selaku pemberi dana. Masyarakat sebagai penerima manfaat juga memberikan penilaian bagus pada LSM yang menjalankan program Kerja.

## **1. Jenis-Jenis Monitoring dan Evaluasi**

### **a. Internal LSM**

Setiap LSM yang profesional akan melakukan proses monitoring dan evaluasi program kerja. Orang atau utusan dari LSM akan melakukan proses monev terhadap kerja dari lembaganya sendiri. Menurut Budi Hermanto, setiap kali LSM mereka menjalankan program kerja, maka dia akan melakukan proses Monev. Dia ditugaskan untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi.

“Di LSM itu sendiri ada monitoring. Misalnya begini, di Combine, teman-teman menjalankan program, maka saya bertugas mengevaluasi dan monitoring” (Budi Hermanto, 31 Juli 2011).

Hal senada juga disampaikan oleh Roswati Handayani dan Bambang Mujianto. Menurut Roswati Handayani, LSM akan

melakukan kontroling dan kemudian akan dilanjutkan dengan evaluasi. kebanyakan LSM di Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Sementara itu Bambang Mujiyanto berujar, LSM mempunyai pengawas internal. Hal itu dilakukan oleh LSM itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi oleh pihak internal LSM lebih pada administrasi. Dijelaskan oleh Zaki Habibi, monitoring dan evaluasi itu untuk mengontrol program serta uang jalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga di amini oleh Budi Hermanto, menurutnya, dia akan mengontrol apakah uang jalan sesuai rencana, uang habis apa tidak, dan apakah ada masalah atau tidak.

#### **b. Internal Donor**

Lembaga donor juga melakukan monitoring dan evaluasi. Lembaga donor memiliki orang yang bertugas untuk memonitoring dan evaluasi kerja LSM. Ada utusan dari lembaga donor yang ditugaskan untuk memantau kerja LSM. Lembaga donor akan memonitoring dan evaluasi LSM yang menjalankan program kerja mereka. Hal ini memang wajar, karena yang mendanai program kerja setiap LSM adalah pihak lembaga donor. Donatur punya keleluasaan dalam menjalankan proses monitoring dan evaluasi

Ada dua cara proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga donor. *Pertama*, dari pihak lembaga donor sendiri. Lembaga donor akan datang melihat langsung proses kerja dari LSM. Donatur datang untuk melakukan evaluasi. Mereka akan mengevaluasi orang-orang dari LSM. Program kerja yang dijalankan LSM juga tak luput dari pantauan lembaga donor. Bagaimana implementasi dari program kerja, apakah program jalan atau tidak. Hal ini penting bagi LSM, karena, untuk mengukur sejauh mana efektifitas LSM dalam menjalankan program kerja, ujar Budi Hermanto.

*Kedua*, Penunjukan pihak eksternal oleh lembaga donor. Lembaga donor menunjuk orang di luar lembaga donor untuk melakukan proses monev. Memang pada kenyataannya, monev cenderung banyak dilakukan oleh pihak donor. Sengaja atau tidak, pihak donor secara sepihak kerap melakukan penunjukan langsung pihak yang memonitoring dan evaluasi. Menurut Zaki Habibi, setiap monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal akan ditunjuk oleh pihak lembaga donor. Artinya, walaupun monev dilakukan oleh pihak eksternal donor, namun dalam penunjukannya dilakukan oleh lembaga donor. Secara otomatis monev dari eksternal tadi akan bekerja untuk lembaga donor, tentu hal ini menjadi monev internal donor.

Dalam melakukan proses monev, lembaga donor sudah mempunyai alat ukur tersendiri. Menurut Wahyu, lembaga donor dan LSM akan membuat kesepakatan tentang ukuran monev. Sebelum penandatanganan program Kerja, lembaga donor telah mengkomunikasikan proses monev secara terbuka.

“Sejauh sepengetahuan saya, kalau dalam konteks program, dan ini bekerja sama dengan pihak donor. Lembaga donor sendiri sudah punya alat monev sendiri, bung bisa buka di *website* Tifa. Mereka punya alat ukur monev sendiri, dan itu biasanya sebelum acc dan MOU penandatanganan program, mereka sudah melakukan satu komunikasi terbuka dan efektif dengan calon penerima dana hibah itu. Umpanya ini alat ukur atau alat monevnya kayak gini, tentu ada kesepahaman tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas, itu yang disepakati artinya itu yang dilakukan” (Wahyu, 19 Agustus 2011).

### c. Independen

Model yang terakhir adalah monev independen. Monev independen tidak bekerja untuk LSM ataupun lembaga donor. Monev independen adalah monev yang bekerja diluar lembaga donor dan LSM. Tidak adak keterikatan khusus antara monev independen dengan lembaga donor dan LSM. Monev independen punya lembaga khusus. Meskipun perorangan, monev independen tidak punya ikatan dengan salah satu lembaga manapun.

Namun dalam menjalankan tugasnya, monev independen bisa saja dibayar oleh lembaga donor. Ataupun sebaliknya, LSM yang menggaji orang yang memonitoring dan evaluasi program kerja mereka. Hal ini dijelaskan oleh Didin Suhadi dan Bambang

Mujiyanto. Menurut Didin Suhadi, LSM yang sudah besar biasanya akan menunjuk sendiri evaluator dari luar. LSM akan menggaji evaluator yang bekerja mengevaluasi pekerjaannya. Ditambahkan Bambang Mujiyanto, selain LSM yang mempekerjakan monev independen, pihak donor juga terkadang ikut menunjuk monev independen. Lembaga donor akan menentukan lembaga independen yang akan memonitoring dan evaluasi pekerjaan LSM.

Menurut Budi Hermanto, monev independen bekerja sangat profesional dan transparan. Meskipun digaji oleh salah satu lembaga, monev independen bekerja dibawah sumpah dan tidak ada seorangpun yang bisa mengintervensi pekerjaan monev independen. Ketika pekerjaan LSM jelek, maka akan di tulis jelek. Begitu juga sebaliknya, jika LSM bekerja dengan bagus, sesuai ketentuan, maka akan ditulis bagus. Monev independen akan menulis hasil monitoring dan evaluasi secara apa adanya.

“Tapi auditor itu bekerja dibawah sumpah, mereka bekerja dengan sangat profesional dan independen, mereka tidak bisa di intervensi siapa pun. Ketika laporan keuangan kamu tidak wajar, dia akan mengatakan tidak wajar. Mentang-mentang aku yang bayar, terus aku bisa mengaur-ngatur, iya tidak bisa” (Budi Hermanto, 30 Juli 2011).

Monitoring dan evaluasi dari lembaga independen sangat penting. Penting bagi LSM dan juga penting bagi lembaga donor. Hal ini untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas dari setiap lembaga. LSM akan dipercaya oleh pihak donor sebagai pemberi

dana. Begitu juga sebaliknya, LSM akan menilai lembaga donor profesional dalam mengevaluasi pekerjaan mereka

Hal ini dijelaskan oleh Yosi, penting bagi setiap LSM untuk dimonitoring dan evaluasi oleh pihak independen, karena monev dari independen dapat meningkatkan kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari lembaga donor maupun kepercayaan dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Tidak mungkin reputasi suatu LSM dinilai baik oleh masyarakat jika kinerjanya tidak dievaluasi oleh orang lain. Roswati Handayani juga berujar demikian, susah mau membangun kepercayaan jika kita tidak di monitoring dan evaluasi oleh lembaga yang benar-benar independen.

## **2. Hal yang di Monitoring dan Evaluasi**

### **a. Keuangan**

Uang adalah sesuatu yang sangat vital dalam kerja LSM. Tanpa uang tidak akan mungkin program kerja LSM akan jalan. LSM, khususnya di jogja, sangat tergantung pada uang yang dihibahkan oleh lembaga donor, karena sebagian LSM tidak mempunyai sumber dana lagi selain dari lembaga donor. Tidak banyak LSM yang bisa hidup mandiri.

Menurut Ibad banyak LSM yang sumber dananya tunggal. LSM hanya menggantungkan hidupnya pada lembaga donor. Jarang sekali LSM yang bisa hidup mandiri. Artinya, tidak bisa

menghidupi atau membiayai programnya sendiri. Ketergantungan akan donor sangat memungkinkan suatu LSM untuk didikte oleh lembaga donor selaku pemberi donor.

Menjadi wajar kemudian bila sebagian lembaga donor sangat ketat dalam melakukan kontrol terhadap uang, karena mereka yang membiayai program kerja yang dijalankan oleh LSM. Zaki Habibi menjelaskan, fokus kontrol lembaga donor hanya sebatas dana. Lembaga donor sangat ketat dalam mengurus dana, tapi dalam satu hal tidak terlalu sibuk mengontrol hasil sosial yang menjadi tujuannya.

“Kebanyakan *funding* itu kebanyakan ribut soal dana. Tapi tidak 100% selalu terjadi begitu. *Funding* yang fokusnya soal kontrol grant/dana antara lain: UE (European Union). Dia sangat ketat dalam pengurusan uang tapi dalam satu hal tidak selalu sibuk mengontrol hasil sosial yang menjadi tujuannya” (Zaki Habibi, 29 Juli 2011).

Zaki Habibi mencontohkan, lembaga donor memberikan uang kepada LSM sebanyak 100.000 dolar untuk program kerja selama 2 tahu. Lembaga donor akan melakukan *cross-cek* apakah uang habis apa tidak. Untuk apa saja. Apakah ada kesesuaian dengan proposal yang diajukan. Lembaga donor akan ketat ketika berbicara masalah uang.

## b. Administrasi

Banyak dari lembaga donor hanya melakukan monitoring dan evaluasi hanya sebatas administrasi. Tidak pada apa yang dihasilkan. Zaki Habibi menjelaskan, ukuran ketat dari lembaga donor adalah program yang dijalankan sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal ini karena kebanyakan kerja LSM bertumpu pada *dokument based*. Penilaian lembaga donor pada LSM adalah berbasis *dokument based*.

“sekali lagi, intinya *dokument based*. Selama ada dokument besadnya semua bisa jalan. Ukuran ketat dari *funding* adalah asal sesuai proposal. Asal ada buktinya iya bisa. Jadi, dibidang ketat versi *funding* adalah asal sesuai proposalnya. Versi LSM asal ada uang untuk bisa menghidupi LSMnya” (Zaki Habibi, 29 Juli 2011).

Monev dengan cara administrasi sering dilakukan pada program kerja yang hasilnya tidak bisa diukur secara matematis. Tidak bisa dilihat hasilnya. Kurniawan menjelaskan, ketika suatu LSM membuat kegiatan tentang penyuluhan dan pelatihan, susah sekali untuk mengukur tentang pengetahuan seseorang, karena yang mengetahui tentang pengetahuan seseorang hanya orang yang orang itu sendiri.

Maka cara yang sering dilakukan orang atau lembaga yang memonitoring dan evaluasi adalah memeriksa secara administrasi. Dokumen-dokumen seperti absensi kehadiran, foto dan vidio dokumentasi serta catatan atau nota dana yang dikeluarkan. Mereka tidak memonitoring dan evaluasi pada hasil sosial yang

didapat, melainkan hanya pada kelengkapan dokumen bukan substantif.

Kurniawan mencontohkan, ketika suatu LSM mengadakan penyuluhan melek politik. Hal yang dimonitoring dan evaluasi lembaga donor adalah proses pelaporan proposal program kerja. Misalnya, absensi dari kegiatan, foto kegiatan dan cerita kegiatan dari LSM. Persoalan masyarakat yang didik paham atau tidak, lembaga donor tidak terlalu peduli. Jadi, monitoring dan evaluasi lembaga donor lebih pada administrasi buka subtransi dari hasil kerja LSM.

“Iya hasil tapi tidak substantif. Misalnya gini, kamu mengadakan program melek politik. Kalo dalam pelaporan program kegiatan kan yang kamu laporkan paling absensinya, fotonya, terus bikin cerita dan tempat dimana, kan itu saja. Persoalan yang didik paham atau tidak siapa yang tahu, padahal itu subtransinya kan, dan itu tidak pernah terukur. Dan donor tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang saya (donor) tahu duit sudah dikeluarkan, soal tercapai atau tidak iya sana” (Kurniawan, Juli 2011).

### c. Hasil

Walaupun tidak terlalu signifikan, hasil kerja adalah salah satu yang dimonitoring dan evaluasi. Hasil kerja dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, hasil kerja dari program kerja non-fisik. Bentuk dari kerja non-fisik seperti penyuluhan, pelatihan dan pembelajaran masyarakat. Hasil kerja seperti ini sangat susah untuk mengukur keberhasilannya. Ada alat ukur tersendiri.

Masing-masing dari lembaga monev akan berbeda cara menilainya.

Menurut penuturan Budi Hermanto, cara penilai hasil program kerja non-fisik adalah dengan cara kontrol dan evaluasi langsung ke lapangan. Misalnya program tentang transparansi pemerintahan desa. Pihak monev akan mengukur hasil kerja LSM yang menjalankan program. Mereka akan melakukan cek langsung kelapangan. Apakah benar lurah sudah transparan dalam membuat laporan keuangan ke publik. Apakah masyarakat sudah tahu hasil laporan keuangannya. Jadi, pihak monev akan terjun langsung ke lapangan. Mereka akan mengunjungi lokasi program kerja yang dijalankan. Lalu menilai langsung hasil kerja LSM.

Bambang Mujianto menambahkan, dia pernah ditugaskan untuk menjadi monev. Program kerja yang di monev adalah terkait pelatihan masyarakat. Dia melakukan *cross cek* kelapangan. Pergi menemui masyarakat peserta penyuluhan. Lalu dia menanyakan hasil yang didapat oleh masyarakat setelah mengikuti sesi latihan tersebut.

Jadi, sangat tidak mudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang tidak terukur. Program kerja non-fisik relatif lebih susah untuk dinilai. Ada ukuran tersendiri dalam mengukur hasil program kerja yang abstrak seperti ini. Masing-

masing pihak monev memiliki alat ukuran atau *tools*. Survei secara langsung ke lapangan adalah salah satunya.

*Kedua*, hasil program kerja fisik. Berbeda dengan program kerja non-fisik, untuk mengukur hasil kerja fisik relatif lebih mudah. Hasil kerja fisik bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak membutuhkan waktu lama dalam menilainya. Pihak monev cukup dengan melihat hasil yang dicapai. Hasil kerja yang di lakukan sudah jelas.

Budi Hermanto menegaskan, program fisik bisa diukur secara matematis. Bisa dilihat secara kasat mata. Dia mencontohkan, “misal begini, kita melaksanakan pembangunan sebuah rumah, tujuannya terbangunnya sebuah rumah, 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 garasi dan 1 gedung, itu tujuan. *Output* yang harus tercapai maka harus ada tanahnya, harus ada bahan bangunannya, harus ada gambarnya, harus ada tukang yang mengerjakannya, ini namanya *output*” (Budi Hermanto, 5 Agustus 2011).

Sebagaimana layaknya lembaga profesional, lembaga donor juga akan menilai secara dokumen. Lembaga donor menilai dengan cara melihat proposal. Lembaga donor akan menyesuaikan apa yang tertera dalam proposal dengan program kerja yang dihasilkan LSM. Menurut Roswati Handayani, setiap kerja LSM harus ada kesesuaian antara proposal kerja dengan yang diimplementasikan.

Budi Hermanto mengatakan, setelah menyelesaikan program kerja, LSM akan mengirim laporan kerja kepada lembaga pemberi dana. Lembaga donor akan menyesuaikan laporan kerja dengan hasil kerja LSM kemudian lembaga donor akan

mengevaluasi laporan kerja dengan cara *field trip*. Lembaga donor meninjau atau berkunjung langsung kelapangan untuk menilai apakah ada kesesuaian antara laporan dengan yang dihasilkan.

“Mereka terima laporan dari LSM, LSM mengirim laporan, kemudian laporan umumnya sama mereka dievaluasi melalui *field trip*, yaitu kunjungan kelapangan, mengecek, benar tidaknya laporannya. Evaluasi selalu cek kelapangan bukan hanya diatas kertas” (Budi Hemanto, 31 Juli 2011).

## **E. Relasi Antar LSM**

Relasi antar LSM menjadi hal yang tak lazim lagi di dunia kerja LSM. Layaknya organisasi pada umumnya, LSM juga membutuhkan teman untuk bekerjasama. Biasanya hubungan ini terjadi dalam penggalangan dana dan pengerjaan program kerja. Hal ini terjadi karena ada sebagian LSM yang tidak punya kemampuan untuk mengerjakan sendiri program kerja yang diberikan lembaga donor. Atau bisa jadi LSM tertentu kesulitan untuk mendapatkan dana dari lembaga donor. Hubungan yang terjadi dalam dunia kerja LSM adalah hubungan antara LSM yang sudah lama berdiri atau LSM senior dengan LSM yang baru atau kecil dan antara sesama LSM senior.

### **1. LSM Senior/Lama-LSM Baru**

Seringkali LSM baru sulit untuk mendapatkan dana untuk menjalankan program kerja dari lembaga donor. Kinerja serta reputasi yang belum diketahui oleh lembaga donor adalah salah satu alasan

lembaga donor enggan memberikan dana pada LSM baru. Selain itu lembaga donor lebih cenderung memilih LSM yang sudah besar untuk diberi kepercayaan pengerjaan program kerja. Hal ini didasari lembaga donor sudah mengetahui reputasi dan kinerja dari LSM senior.

Namun LSM baru punya strategi tersendiri dalam mencari dana untuk program kerja. Salah satunya dengan cara membangun relasi dengan LSM baru/senior. Hubungan yang terjadi antar LSM senior dan LSM baru dilakukan dengan cara meninduk atau berkoalisi dengan LSM senior.

Menginduk dengan LSM senior adalah salah satu strategi LSM baru untuk mendapatkan dana dari lembaga donor. LSM baru akan bergabung dengan LSM senior. Mereka akan menumpang pada LSM lama yang sudah sering mendapatkan dana dari lembaga donor. Sementara LSM yang sudah senior akan mendampingi LSM baru dalam mencari dana pada lembaga donor.

Zaki Habibi menjelaskan bahwa LSM yang masih kecil dan belum dikenal akan menginduk pada LSM yang lebih besar dan lebih mapan. LSM besar tentu lebih berpengalaman, karena sudah pernah mendapatkan dana dari lembaga donor sebelumnya. Sementara LSM kecil yang relatif baru dan belum pernah sama sekali mendapatkan dana dari lembaga donor.

Dia menambahkan, LSM baru biasanya akan mengajukan dana pada lembaga donor relatif kecil. Hal ini karena LSM baru tersebut hanya mampu mengelola kegiatan-kegiatan yang skala kecil saja. Tentu dana yang diajukan juga kecil. Sementara lembaga donor jarang sekali mengucurkan dana untuk program kerja dengan jumlah kecil. Untuk mengatasi itu, LSM baru akan menumpang pada LSM senior yang organisasinya sudah cukup besar dan dikenal oleh lembaga donor serta terbilang mampu mengelola program kerja yang besar.

“Jadi gini, ini strategi pengajuan proposal. LSM yang kecil dan belum dikenal akan menginduk pada LSM yang lebih besar dan lebih mapan yang sudah pernah dapat *grant* dari *funding*. Misalnya gini, kamu LSM yang besar dan pada satu tahun pertama berhasil mengajukan dana, dan ingin mengajukan dana lagi. Terus aku ingin mengajukan dana, karena aku LSM kecil, aku menumpang LSM Dendy.” ( Zaki Habibi, 29 Juli 2011)

Ditambahkan oleh Wahyu, LSM yang sudah senior akan melakukan pendampingan pada LSM baru. Pendampingan pada LSM baru mencakup keseluruhan kerja LSM. Pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan proposal kerja, pengajuan proposal kerja, hingga pengerjaan program kerja. Hal ini dilakukan karena LSM kecil yang relatif baru belum punya cukup pengalaman dalam berhubungan dengan lembaga donor. Serta belum memiliki persyaratan formal untuk menjadi sebuah organisasi yang profesional.

Budi Hermanto mencontohkan, LSM anti korupsi yang relatif baru dan belum dikenal. LSM baru tersebut akan melakukan

kerja sama dengan LSM senior. Ketika akan mengadakan kegiatan pendidikan anti korupsi, mereka membutuhkan dana untuk pengerjaan program kerja. Sementara LSM baru tersebut belum mendapat kepercayaan dari lembaga donor, maka LSM baru tersebut berkoalisi dengan LSM senior seperti ICW yang notabene sudah dikenal oleh lembaga donor.

## **2. Antar Sesama LSM Besar/Senior**

Ketergantungan yang besar pada lembaga donor menimbulkan situasi kompetitif antar LSM. LSM akan berlomba mendapatkan dana dari lembaga donor. Persaingan terjadi antara sesama LSM besar yang sama-sama pernah menjalin kerja sama dengan lembaga donor. Dampak dari situasi seperti itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar LSM besar. Sehingga ada sebagian LSM besar melakukan kanalisasi dana, karena LSM tersebut enggan berbagi program kerja dengan LSM lain.

Menurut Ibad ada tiga cara LSM besar dalam melakukan kanalisasi pendanaan. *Pertama*, kanalisasi isu. Dia mencontohkan LSM yang bergerak di bidang perempuan, yakni Kapak Perempuan, ketika ada isu yang berhubungan dengan perempuan, maka LSM tersebut akan masuk. Jadi, apapun isu yang diangkat oleh lembaga donor, selagi ada keterkaitan dengan perempuan maka LSM kapak

perempuan akan mengajukan proposal kerja. Bisa dikatakan LSM tersebut serakah. Tidak mau berbagi dengan LSM lain. Dia tidak peduli apakah mampu melakukan dengan baik apa tidak terpenting baginya adalah mendapatkan dana dari program kerja lembaga donor tersebut.

*Kedua*, kanalisasi cara berkelompok. LSM besar kerap berafiliasi dengan LSM besar lainnya yang sudah dikenal. Sehingga kedekatan ini berdampak pada tingkatan pendanaan yang hanya “berputar” antar LSM besar. Akibatnya LSM lain yang bergerak dalam bidang yang sama tidak mendapat bagian dalam hal pendanaan.

*Ketiga*, kanalisasi geografis. Keberadaan LSM disuatu daerah tertentu dapat menimbulkan kanalisasi pendanaan. Menurut Ibad, seringkali LSM tidak siap bekerjasama dengan LSM lain karena zona geografis. LSM yang sudah lama berada disuatu daerah tertentu akan sulit bekerjasama dengan LSM lain yang ingin bekerja di “daerahnya”. Ada kecendrungan LSM tersebut enggan memberi informasi, data-data yang terkait dengan kerja LSM kepada LSM lain.

Kekuatiran LSM yang melakukan kanalisasi geografis adalah berkurangnya proyek kegiatan mereka. Daerah yang sempit serta objek binaan mereka yang sama adalah salah satu faktor kanalisasi secara geografis. Secara tidak langsung ketika mereka berbagi, maka kedudukan mereka secara ekonomi politik terganggu. Kanalisasi

geografis seperti ini berimplikasi pada dana dari lembaga donor yang secara keseluruhan masuk dalam kantong LSM “penguasa” tersebut.

Ditambahkan lagi oleh Ibad, situasi kanalisasi dana diakibatkan tujuan dari sebagian LSM adalah uang. LSM benar-benar menggantungkan hidupnya pada lembaga donor. LSM menjadikan dana dari lembaga donor sebagai *fanraesing*. Lembaga donor sebagai sumber ekonomi dari LSM, karena tidak ada penghasilan lain selain bertumpu pada lembaga donor.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Review Umum**

Dari hasil lapangan di bab III, terlihat relasi kuasa dalam jejaring pendanaan LSM di Yogyakarta. Relasi kuasa tersebut dapat dilihat kecenderungan “superior” lembaga donor yang termefestasikan dari pewacanaan isu, monitoring, dan kanalisasi dana. Pada pewacanaan isu, terlihat jelas bahwa lembaga donor selaku pemberi dana bisa sesuka mereka melakukan pewacanaan isu sesuai yang mereka kehendaki.

Lembaga donor memperlihatkan dominasinya dengan menentukan isu yang ingin mereka angkat. Lembaga donor melakukan praktek pewacanaan atau diskursus yang cenderung sepihak dan sangat sistematis yang kemudian cenderung sulit di mengerti oleh LSM. Meskipun ada sebagian LSM yang bisa menentukan isu, tapi persentase LSM yang melakukan itu sanagat kecil. Hanya LSM besar dan sangat dekat dengan lembaga donor saja yang mampu melakukan hal itu.

Pewacanaan isu yang dibangun oleh lembaga donor tersebut dengan sendirinya akan diikuti oleh LSM. Mencocokkan program kerja dengan isu yang dibangun LSM adalah cara yang dipakai LSM. LSM berusaha mengait-ngaitkan program kerja mereka dengan program kerja yang dibentuk oleh lembaga donor. Namun pada titik tertentu, bila LSM tegas pada fokus kerja mereka, hal demikian tidak akan terjadi.

Juga demikian halnya dalam proses monitoring dan evaluasi program kerja. Secara keseluruhan monitoring dan evaluasi didominasi oleh lembaga donor. Meskipun proses monev dilakukan oleh pihak eksternal lembaga donor, namun pihak yang menggaji monev eksternal tersebut adalah lembaga donor. Secara tidak langsung lembaga monev eksternal tersebut bekerja untuk lembaga donor. Hal ini semakin menunjukkan “superior” lembaga donor terhadap LSM.

Walaupun ada sebagian sebagian LSM yang melakukan monev sendiri. Monev yang dilakukan hanya sebatas kinerja lapangan. Sementara kontrol keuangan tetap dilakukan oleh lembaga donor selaku penghibah dana. Banyak lembaga donor yang melakukan kontrol lebih terhadap uang. Uang adalah sesuatu yang sangat vital dalam kerja LSM. Tanpa uang, LSM tidak akan bisa menjalankan program kerjanya. Jadi, kuasa lembaga donor dengan cara mengontrol keuangan, tentu tidak sebanding dengan monev LSM yang hanya sebatas kinerja.

Pada proses kanalisasi dana terlihat hubungan yang tidak seimbang antar LSM. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menimbulkan persaingan antar LSM. Hal itu menyebabkan sebagian LSM melakukan kanalisasi dana. LSM melakukan persaingan yang tidak sehat dengan cara menghalangi LSM lain mendapatkan dana. Seperti dengan cara menghalangi melakukan kanalisasi isu, kanalisasi berkelompok, dan kanalisasi goeografis. Itu semua akan berujung pada penguasaan dana oleh sebagian LSM tertentu.

## B. Wacana: Pengetahuan dan Kekuasaan

Lembaga donor adalah lembaga yang dominan ketika menentukan isu program kerja dalam dunia LSM. Program kerja yang dikerjakan oleh LSM merupakan bagian dari isu yang dibangun melalui pewacanaan isu oleh lembaga donor. Lembaga donor melakukan pewacanaan isu dengan sangat sistematis, dan cenderung sepihak. Jarang sekali LSM bisa menentukan isu yang ingin di kerjakannya.

Sedikit sekali LSM yang bisa menentukan isu dari sekian banyak LSM yang ada di Yogyakarta. Hanya LSM besar, dipercaya lembaga donor dan punya otoritas khusus yang bisa melakukan penentuan isu. Itu pun harus mengikuti isu yang sedang *trend*, tentunya bentukan lembaga donor. Lebih tepatnya bukan mewacanakan isu tetapi menentukan program kegiatan. Suatu yang lebih sempit, lebih spesifik dibandingkan *trend* isu yang mencakup keseluruhan program.

Menurut Foucault (Santoso dkk, 2007: 171) wacana atau *discourse* merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan. Bisa juga dikatakan *enonce* (statemen). Statemen disini bukan merupakan suatu ungkapan atau proposisi. Untuk memperjelas dia menghubungkan *speech act* dengan statemen. Statemen dan *speech act* hanya butuh diterima dengan begitu saja, dan menempatkan statemen dalam konteks aktual dengan jejaring statemen yang lain.

Berbeda *speech act* dari Searle, dia lebih tertarik pada *everyday speech act*, bagaimana seorang pendengar memahami sebuah *speech act*.

Untuk memahaminya, maka pendengar harus mendengarnya dalam konteks lokal dan pragmatis yang menentukan kondisi penggunaan *speech act* tersebut. Sedangkan Foucault, tidak tertarik dengan itu semua, tetapi lebih tertarik dengan jenis-jenis *speech act* yang telah terpisah dari konteks lokal yang kemudian membentuk realitas yang relatif mandiri (otonomi). *Speech act* seperti ini menjadi statemen ketika seseorang menyusun dalam suatu prosedur validitas yang pasti, dalam komunitas para ahli, dan lain-lainnya yang kemudian mempunyai konsekuensi sosial yang serius (Santoso dkk, 2007: 172).

Dianalogikan, ‘hari ini akan hujan’, itu semua *everyday speech act* dengan konteks lokal, tapi bila diucapkan oleh seorang pakar dari biro meteorologi dan geofisika berdasarkan teori meteorologi akan menjadi sebuah statemen. Dengan demikian ada lembaga-lembaga yang punya wewenang atau otonomi untuk memberikan klaim pada statemen yang kemudian akan menjadi pengetahuan dan disebarakan kepada yang lain.

Bicara pada konteks dunia kerja LSM. Lembaga donor memiliki otonomi dalam menentukan program kerja. Karena faktanya yang memberi dana program kerja tersebut adalah lembaga donor. Lembaga donor sebagai suatu lembaga pemilik dana memiliki kewenangan dalam menentukan isu. Statemen atau bentuk wacana tertentu pada suatu isu tertentu akan menjadi sebuah pengetahuan. isu yang di wacanakan oleh lembaga donor kemudian akan menjadi suatu pengetahuan yang kemudian di sebarakan ke LSM-LSM yang ada di Yogyakarta.

Dalam arkeologi penegetahuannya, Foucault menjelaskan regulasi suatu praktek diskursif atau pewacanaan. Menurut dia, dengan “regulasi” memungkinkan untuk kondisi-kondisi tertentu memaikan peran dalam suatu diskursus. Belum tentu paraktek diskursus itu tampak pada ilmuan-ilmuan paling besar dan paling orisinal, bisa saja regulasi diskursus itu tampak pada tokoh-tokoh biasa dan kurang orisinal (Bertens, 2006: 349). Dalam hal ini LSM memiliki kewenangan dalam membentuk isu. Walaupun kemudian isu yang di bangun LSM sesuai dengan isu yang sedang *trend* yang itu bentukan lembaga donor.

Menurut Foucault suatu diskursus memungkinkan untuk menjadi pengetahuan bila terjadi relasi-relasi antar statemen. Kelompok-kelompok statemen dengan statemen lain yang berbeda. Kemudian dia menyebutnya sebagai bentuk diskursif. Pewacanaan isu-isu pada dunia kerja LSM terjadi pewacanaan isu lembaga donor dan pewacanaan isu LSM. Kemudian dia menghubungkan kelompok-kelompok statemen dengan apa yang dia sebut sebagai *enunciative modalities*, yaitu suatu aturan atau hukum yang beroporasi dibelakang statemen yang bermacam-macam. Diantaranya berkaitan dengan siapa yang mempunyai hak untuk menyatakan statemen. Posisi apa yang ditempati subyek yang menyatakan stetamen (Santoso dkk, 2007: 175).

Tentunya dalam hal ini lembaga donor memiliki cukup hak untuk menyatakan stetamen dibandingkan dengan LSM. Lembaga donor memiliki kedudukan yang lebih “superior” dalam menentukan isu. Hal ini

karena lembaga donor yang memiliki uang untuk program kerja LSM. Uang adalah sesuatu yang sangat vital dalam dunia kerja LSM. Lembaga donor menempati posisi yang sangat strategis. Pengetahuan yang memadai tentang suatu isu tertentu memungkinkan lembaga dana untuk menebar pegelaran kuasa pada LSM.

Seperti diungkapkan Foucault, “kekuasaan membuat gila” namun kekuasaan itu menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru. Sebaliknya pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan (Sarup, 2008:113). Pengetahuan yang dimiliki lembaga dana akan menciptakan kekuasaan pada LSM. Pengetahuan tentang isu yang dominan dan tidak seimbang antara LSM dan lembaga donor, pegelaran kuasa lembaga donor semakin memungkinkan terjadi.

Pola-pola hubungan antara LSM dan lembaga donor cenderung bersifat *top-down*. Mengingat yayasan cenderung menjadi organisasi yang hierarkis (Fakih, 2010: 156). Lembaga dana memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan visi, misi, maupun program LSM. Kerja sama yang seimbang antara lembaga donor dan LSM tidak memungkinkan terwujud karena hubungan yang tidak seimbang antara keduanya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut diakibatkan oleh ketimpangan infrastruktur, pemahaman isu, dan kapasitas LSM. Sehingga lembaga donor mempunyai cukup ruang untuk “bermain” dalam pewacanan isu

dari program kerja LSM yang kemudian diikuti dengan produksi kekuasaan. Lembaga donor menebarkan kekuasaan melalui pengetahuan. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada didalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, bukan saja karena kuasa berguna bagi pengetahuan, tetapi pengetahuan menyediakan kuasa (Bertens, 2006: 355). Lembaga-lembaga dana memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membentuk agenda kerja sama LSM. Banyak agenda LSM pada dasarnya ditentukan oleh lembaga donor.

Sebagaimana yang dikatakan Foucault, kekuasaan bukan diraih melalui kekerasan atau tindakan represif, tetapi melalui pewacanaan yang terus menerus. Pewacanaan yang mendominasi dari suatu waktu dalam sejarah dan suatu tempat di dunia sehingga manusia memiliki kerangka berfikir, atau pandangan dunia tertentu (Jones, 2009: 174). Dengan dominasi lembaga donor pada pewacanaan isu yang dilakukan terus menerus dan tanpa henti. Serta disebarakan secara menyeluruh disetiap LSM di Yogyakarta, sementara LSM hanya akan mencocokkan isu yang dibangun oleh lembaga donor. Dengan pemahaman tentang isu yang tidak seimbang dan pewacanaan isu yang dibangun lembaga donor cenderung sepihak, mengakibatkan peggelaran kekuasaan semakin terlihat jelas.

LSM sangat sulit memahami pewacanaan isu yang dibentuk oleh lembaga donor. Pewacanaan isu oleh lembaga donor cenderung abstrak dan susah dipahami oleh LSM. Walaupun secara kasat mata LSM bebas

menentukan kegiatan kerja, namun isu yang dibangun harus terkait dengan isu yang besar yang dibentuk oleh lembaga donor. Seolah-olah LSM bebas namun pada kenyataannya diarahkan. Lembaga donor melakukan pengkondisian yang sedemikian rupa pada kerja LSM sehingga LSM tidak cukup punya pilihan atas pemaknaan kerja yang dilakukannya. Foucault menekankan, bahwa kuasa itu strategi bukan kepemilikan (Bertens, 2006: 354).

Menurut Foucault tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Pengetahuan itu tidak mungkin bersifat netral dan murni dan selalu bersifat politis (Foucault, 2006:255). Kemudian apa pengetahuan yang disebar lembaga donor ?. Seperti yang kita tahu bahwa semua kegiatan yang dilakukan lembaga donor di Yogyakarta selalu terkait dengan demokratisasi. Seperti keterbukaan informasi publik, pluralisme, masyarakat terbuka dan sebagainya, semua terkait demokratisasi.

Menurut Widjajanto (2007: 89), campur tangan lembaga donor dapat terjadi apabila para donor tersebut menganggap bahwa tanpa adanya bantuan dari mereka, suatu negara tidak akan menjadi negara yang sejati menerapkan nilai-nilai demokratisasi. Demokratisasi menjadi *trend* isu di kalangan dunia LSM. Lembaga donor selalau berbicara tentang demokratisasi. Sementara demokratisasi adalah bentuk lain dari modernisme ala barat. Demokratisasi adalah roda ideologis yang

menggerakkan kapitalisme, materialisme dan modernitas (Fauzi, 2005: 12).

Sementara LSM menjadi perpanjangan dari lembaga donor. Lembaga donor mengangkat dan menyebarkan isu demokratisasi. LSM mengadopsi isu yang dibentuk lembaga donor. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menyebabkan LSM sulit untuk tidak mengikuti wacana lembaga donor. Didalam ketidakberdayaan LSM, semakin menunjukkan dominasi lembaga donor saat pewacanaan isu.

Mengingat pemberi dana adalah lembaga donor internasional yang didominasi oleh barat. mungkin ide modernisme dan demokratisasi “diseludupkan” melalui program kerja LSM. Menurut Fakhri (2010: 65), ide pembangunan dan demokratisasi sangat mempengaruhi visi dominan perubahan sosial di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Sementara kecenderungan LSM di Indonesia, khususnya di Yogyakarta mengikuti ide lembaga donor tersebut melalui pencocokan terhadap isu yang telah dibentuk sedemikian rupa.

### **C. *Panopticon*: Monitoring dan Evaluasi Sebagai Pendisiplinan**

Menurut Foucault, kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, dan represi, melainkan melalui jalan normalisasi dan regulasi (Bertens, 2006: 357). Begitu juga halnya pada dunia kerja LSM. Kuasa lembaga donor terhadap LSM tidak dilakukan melalui penindasan, melarang

membatasi dan sebagainya. Justru sebaliknya, lembaga donor melakukan dengan cara positif dan produktif, yakni melalui monitoring dan evaluasi.

Lembaga donor memonitoring dan evaluasi program kerja LSM. Lembaga donor melakukan monev pada setiap kerja LSM yang didanainya. mengontrol dan evaluasi yang dilakukan lembaga donor sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Aturan dan regulasi monev dibuat dengan setandar kerja lembaga donor. Tentunya monitoring dan evaluasi dilakukan agar pekerjaan LSM bekerja dengan baik.

Namun disadari atau tidak, monitoring dan evaluasi itu merupakan bagian dari normalisasi. Lembaga donor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSM untuk normalisasi pekerjaan LSM. Menurut Bertens (2006: 357), untuk dapat mewujudkan normalisasi itu perlu dikembangkan suatu sistem kontrol yang amat kompleks. Normalisasi berfungsi sebagai alat penyaring dan pensortir. Sementara pekerjaan hanya dimungkinkan karena proses normalisasi yang menjadikan manusia sebagai tenaga kerja.

Normalisasi dan regulasi tentu memiliki tujuan tertentu. Dalam buku yang berjudul *Menjaga dan Menghukum*, Foucault berbicara tentang normalisasi dan regulasi yang merupakan bagian upaya pendisiplinan. Buku tersebut bercerita tentang normalisasi atas tubuh. Tubuh didisiplinkan. Tubuh yang sehat, kuat, energik sengaja dibentuk. Semua itu bertujuan untuk keberlangsungan proses produksi. Ketika tubuh pekerja sakit, lemah dan lemas maka dengan sendrinya proses produksi kapitalis

akan terhambat. Tubuh yang kuat, atletis, dan sehat berguna untuk kepentingan produksi. Menurut Foucault, tidak mengherankan bahwa masyarakat kapitalis moderen gencar mempromosikan tubuh yang sehat sebagai ciri kebudayaan yang sentral dan kuat (Jones, 2009: 81).

Begitu juga halnya pada proses monitoring dan evaluasi kerja LSM. Lembaga donor melakukan normalisasi dan regulasi pada proses monev. Monitoring dan evaluasi berguna untuk pendisiplinan. Pekerja LSM akan bekerja sebaik mungkin, tidak keluar dari ketentuan lembaga donor. Dengan demikian LSM akan sendirinya disiplin, karena menurut Bertens (2006: 357), pekerjaan merupakan suatu cara untuk melatih dan menanamkan disiplin. Sementara disiplin merupakan teknik kuasa, bukan sebuah institusi (Santoso dkk, 2007: 183).

Kuasa disipliner merupakan sistem pengawasan yang dibatinkan sampai pada titik di mana setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Proses mengawasi diri sendiri ini menurut Foucault disebut *Panopticon*. Masih dalam dalam bukunya yang berjudul *Dicsipline and Punish*, Foucault mengagambarkan teknik *Panopticon*. Di sel-sel membentuk melingkar, semua tahanan akan merasa diawasi dengan manara jaga sentral, kemudian secara bertahap tahanan akan mulai mengawasi prilaku mereka sendiri (Sarup, 2008: 103).

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan lembaga donor terjadi paktek *Panopticon*. Dengan monitoring dan evaluasi, para pekerja LSM akan diawasi, dinilai, dan dikontrol oleh lembaga donor. Kemudian

secara bertahap pekerja LSM akan mengawasi perilaku mereka sendiri. Menyesuaikan pelaporan program kerja mereka dengan ketentuan lembaga donor. LSM akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan lembaga donor. Kemudian pihak LSM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap diri mereka sendiri, yang kemudian dinamakan monev internal LSM.

LSM melakukan monitoring dan evaluasi internal. Utusan dari LSM akan melakukan kontrol terhadap pekerjaan individu yang bekerja di LSM itu sendiri. Masing-masing orang akan mengawasi kinerja dari mereka sendiri. LSM melakukan kontrol terhadap diri mereka sendiri, karena memang *Panopticon* mengharapkan kontrol dari semua orang untuk semua orang. Suatu kontrol menyeluruh dan tak henti-hentinya (Bertens, 2006: 352). Baik kontrol dari lembaga donor maupun kontrol dari LSM sendiri selaku penerima dana dari lembaga donor.

Menurut Foucalut, kombinasi kekuatan eksternal dan pengaturan dan pengawasan (menjadi polisi) internal terhadap diri sendiri itulah yang menjadikan wacana kekuasaan yang tak terbendung (Jones: 2009: 189). Sebagaimana tergambar dalam proses monitoring dan dan evaluasi kerja LSM. Lembaga donor dan LSM secara bersamaan melakukan kontrol atas program kerja LSM. Dengan adanya kegiatan monev kerja, LSM menjadi polisi atas dirinya sendiri. Pekerja LSM dikondisikan untuk mengawasi dirinya sendiri.

Panoptisisme melalui monitoring dan evaluasi dapat menjadi alat pengawasan kerja LSM. Monitoring dan evaluasi mirip dengan sebuah teropong (*gaze*) yang ada didalam penjara. Setiap teropong dimana setiap kerja orang tak lepas dari pemantaunya. Lembaga donor dapat melihat semua yang terjadi pada kerja LSM. Melalui monitoring dan evaluasi, lembaga donor dapat mengawasi kerja LSM secara keseluruhan. Menurut Sarup (2008: 104), anda akan dapat melihat kemiripan *Panopticon* (“semua terlihat”) dengan konsep maha tahuNya Tuhan. Semua pekerjaan LSM akan terlihat, terawasi, terkontrol melalui kuasa disiplin.

Dengan pendisiplinan kerja, LSM diharapkan dapat bekerja sebaik mungkin. Bekerja dengan cermat, teliti, agar tidak terjadi kesalahan. Apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai harapan donor maka akan berdampak pada reputasi LSM itu sendiri. *Panopticon* menciptakan subjek yang bertanggung jawab atas kedudukan dirinya sendiri (Sarup: 2008: 115). Kerja yang baik itu kemudian akan kembali pada lembaga donor selaku pemberi dana. Semua itu dikendalikan oleh lembaga donor. Lembaga donor punya hak pendisiplinan yang tak terbantahkan.

Menurut Foucault, melalui kuasa disiplin, memungkinkan suatu pekerjaan untuk dimanipulasi, ditundukan, dimanfaatkan, ditransformasikan, dan diperbaiki (Santoso dkk, 2007:183). Bukan tidak mungkin dalam monitoring dan evaluasi kerja LSM akan terjadi manipulasi dan pemamfaatan, karena lembaga donor menentukan aturan

monev itu sendiri. Lembaga donor punya hak kuasa dalam memonitoring dan evaluasi kerja LSM.

#### **D. Kritik Idiologi CSR**

Sebelum berbicara masalah kritik idiologi dari *Corporate Social Responsibility* atau CSR ada baiknya kita mengingat kembali sejarah berdirinya CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan CSR pada awal berkembangnya muncul akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungannya. Maka kemudian untuk menjawab persoalan tersebut di bentuklah suatu konsep yang kemudian di beri nama *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Widjaja & Pratama, 2008: 11). Dengan kekayaan perusahaan yang melimpah dari hasil eksplorasi kekayaan alam milik masyarakat, Menurut salah seorang pencetus konsep CSR yakni Andrew Carnagie, ada baiknya perusahaan mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat tersebut (Poerwanto, 10: 17).

Namun seiring waktu serta dinamika perkembangan pasar global, banyak para pengusaha memainkan strategi CSR menjadi strategi bisnis. Menurut Fukuyama, kaum kapitalis dengan dongeng pasar bebasnya dan keuntungannya akan menimbulkan dampak negatif, maka untuk itu harus

ada kebijakan alternatif yang didasarkan atas kebijakan etis dan moral, baik pada individu maupun perusahaan. Maka konsep tentang CSR merupakan salah satu konsep yang relevan untuk mengatasi hal tersebut (Wahyudi & Azheri, 2008: xxii).

Dalam suatu tulisan di Kompas online kolom ekonomi, Kompas menuliskan istilah “*CSR Beyond Profit*” dan “*CSR for Profit*”. *CSR beyond profit* dapat diartikan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat menambah beban dan mengurangi profit perusahaan. Filosofi tersebut bergeser menjadi *CSR for profit*. CSR saat ini dianggap bukan menjadi beban bagi perusahaan (yang dapat mengurangi profit perusahaan), tetapi dapat meningkatkan profit perusahaan. Program CSR yang dilakukan perusahaan menjadi sebuah investasi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan (Kompas.com, 29 Juli 2011)

Selain itu campur tangan pemerintah dengan menggodok undang-undang tentang CSR juga memperkeruh motivasi dari CSR itu sendiri. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang PT mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu ayat pada pasal 74, yakni ayat 1 berbunyi “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya*”. (Widjaja dan Pratama, 2008: 93).

Dengan adanya undang-undang tentang pengaturan CSR, kini program CSR sudah menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk beramal pada masyarakatnya. Sehingga secara tidak langsung, perusahaan tidak menjadikan CSR sebagai bentuk kesukarelaan namun sudah menjadi kewajiban. Secara faktual CSR bukan lagi menjadi tindakan “etis” dari sebuah perusahaan, tetapi lebih merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan perusahaan sebagai wujud dari tanggung jawabnya sebagai dampak negatif yang timbul dari pembangunan ekonomi terhadap lingkungannya (Azheri & Wahyudi, 2011, xxii).

Seperti yang diungkapkan oleh Milton Friedman's, tujuan perusahaan hanya untuk mencari untung dan laba semata ( Azheri, 2011, xxiii). Menurut Hernan dan Kiernan, semua masalah lingkungan dan sosial yang terjadi dimasyarakat merupakan perbuatan dari perusahaan. Lebih dari 75 persen permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial adalah dampak dari aktivitas perusahaan. Kemudian strategi CSR hanya dijadikan alat bayaran perusahaan atas permasalahan yang diakibatkannya. Tidak lebih dari itu (Kompas.com, 26 Mei 2011)

Selain itu CSR juga dimanfaatkan sebagai strategi untuk keberlangsungan hidup dari suatu perusaan. Apabila aktivitas CSR diaplikasikan secara baik dan benar maka akan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Dukungan masyarakat atas aktivitas perusahaan akan didapat seiring mamfaat yang didapat dari imlementasi program CSR yang benar. Dukungan dari masyarakat sendiri

adalah aset yang berharga bagi keberlanjutan sebuah perusahaan (Kompas.com, 26 Mei 2011). Kemudian ini yang dinamakan sebagai politik pencitraan.

Kemudian pertanyaannya apa hubungan praktik CSR dengan lembaga donor dan LSM? Menurut salah satu narasumber penulis, sebagian dari uang yang masuk ke lembaga donor merupakan uang dari perusahaan besar Amerika dan Eropa. Semua itu tergantung dari mana asal lembaga donor. Perusahaan-perusahaan besar dari kedua benua tersebut, Amerika dan Eropa, menyisihkan sebagian dananya untuk program amal, kemudian diberikan ke lembaga donor agar penyalurannya tepat sasaran. Tidak sedikit diantaranya merupakan uang dari program CSR. Memang pada kenyataannya tidak semua uang donor adalah uang dari program CSR. Ada banyak penyumbang, baik itu, lembaga amal yang mengumpulkan uang dari individu atau orang kaya dari masyarakatnya, pemerintah, maupun korporat.

Seperti yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya yaitu bab II. Bahwa lahirnya LSM-LSM Dunia Pertama, khususnya di Indonesia tidak lebih dari campur tangan negara asing, salah satunya berkat dukungan lembaga donor. Banyak lembaga donor internasional yang sanggup membiayai semua program dari LSM. Masuknya banyak lembaga donor beriringan dengan munculnya LSM-LSM di Indonesia. Uang yang melimpah dari lembaga donor menyebabkan LSM-LSM baru di Indonesia bermunculan.

Sementara kebanyakan dari LSM di Indonesia sangat menggantungkan hidupnya pada lembaga donor. LSM-LSM ini tidak mampu membiayai program mereka sendiri. Sangat jarang LSM-LSM yang mampu hidup mandiri. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menyebabkan hidup matinya suatu LSM di Indonesia tergantung pada lembaga donor. Hal ini semakin memuluskan dominasi lembaga donor pada suatu LSM.

Lembaga donor jangan diartikan semata-mata sebagai organisasi pembawa kebaikan. Lembaga donor tidak datang dengan segudang uang tanpa kepentingan. Lembaga donor bukanlah entitas tunggal dengan satu misi, visi dan ideologi. Menurut Hancock (2007:vii), lembaga donor tidak lebih sebagai bisnis bantuan yang sama sekali tidak membantu masyarakat dan negara miskin. Mereka justru masuk perangkap yang jauh lebih parah. Lembaga donor tidak lebih sebagai “alat penghisap darah rakyat”. Ini menunjukan adanya penjajahan dalam bentuk baru atau biasa disebut neokolonialisme.

Neokolonialisme adalah babak baru dari kolonialisme, bentuk sistem penjajahan dan penguasaan ala barat. Kalau dahulu kita mengenal istilah kolonialisme sebagai bentuk penguasaan barat terhadap Indonesia melalui kekerasan, penguasaan tanah, dan rempah-rempah serta perbudakan. Kini penjajahan negara Dunia Pertama hadir dalam wajah baru yakni neokolonialisme, namun visi, misi dan ideologi masih tatap sama yaitu hasrat untuk menguasai negara Dunia Ketiga. Neokolonialisme

adalah bentuk penjajahan secara halus (tidak dengan kekerasan dan paksaan) dan meyeleruh baik ekonomi, budaya dan bukan tidak mungkin mengarah pada politik (Loomba, 2003: 9).

Dana CSR perusahaan yang dialirkan melalui lembaga donor dan kemudian masuk pada LSM bukan tidak mungkin menjadi salah satu dari strategi bisnis perusahaan. Kedekatan masyarakat pada LSM menjadi jalan pintas yang sangat memungkinkan untuk menebarkan “benih-benih” kapitalisme. LSM dijadikan perpanjangan perusahaan besar untuk semakin mengamankan kedudukan kapitalisme. Kehadiran *New Social Movement* (NSM) atau gerakan sosial baru semakin mengukuhkan anggapan itu. Menurut Rajendara Sing (Fauzi, 2005: 11), gerakan NSM tidak meneriakkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakkan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas.

Bergabungnya kekuatan besar tersebut yang melanggengkan kuasa kapitalisme, yakni korporat besar dengan strategi CSRnya, lembaga donor dengan uang bantuannya, serta LSM dengan kedekatannya pada masyarakat akar rumput merupakan suatu ciri neoliberalisme. Menurut Wibowo (Saksono, 2009: 137), kehadiran neoliberalisme tidak hanya dirasakan pada bidang ekonomi saja, namun dapat dirasakan hingga seluruh sendi kehidupan masyarakat hingga pelosok dunia. Neoliberalisme melalui dukungan komputer, teknologi yang canggih serta kekuatan kapitalis lokal yang bergabung dengan kapitalis global, bersama-sama

mengeruk kekayaan bumi sembari menjanjikan kemakmuran global yang tidak kunjung datang.

Segala isu program kerja LSM yang dikumandangkan oleh lembaga donor selalu terkait dengan demokratisasi negara. Misalnya undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan program salah satu LSM di Yogyakarta didanai oleh Tifa yang merupakan yayasan donor yang mendapat dana dari *Open Societ* lembaga milik pengusaha Amerika Serikat, George Soros. Undang-undang tentang KIP mengharuskan segala sesuatu yang terkait dengan lembaga milik publik harus transparan dan terbuka pada khalayak umum. Baik itu soal informasi keuangan, program, dan semua hal yang menyangkut kepentingan publik. Hal ini merupakan cerminan dari demokrasi.

Demokratisasi yang dibawa oleh masyarakat barat, khususnya oleh lembaga donor ke Indonesia tak lepas dari segala diskursus orientalisme ala Said. Orientalisme merupakan suatu paham bagaimana cara pandang bangsa barat terhadap bangsa timur. Bangsa timur tidak dipandang dengan apa adanya, namun dipandang bagaimana seharusnya. Orang-orang timur dianggap orang yang lemah, tidak rasional, menyimpang, tradisional serta inferior. Untuk itu perlu “diajari”. Melalui para *Indolog* dengan karya-karyanya, peneliti-penelitian tentang timur, justru malah mempertegas kedudukan rendah masyarakat timur (Samuel, 2010: 35)

Menurut Said (2010: xix), melalui pengetahuan yang didapat dengan usaha pemahaman, studi, dan analisis, masyarakat barat terutama

AS mempunyai kehendak untuk menguasai, mendominasi dunia, serta menjarah sumber daya alam yang langka. Selanjutnya Said menegaskan bahwa penilaian-penilaian yang dilakukan oleh orang barat terhadap dunia timur menciptakan lanskap kering yang dapat digunakan oleh pemerintah Amerika untuk mengontruksi suatu model “demokrasi” pasar bebas.

Cerita ini memang tidak asing lagi, karena memang pada awal kemunculannya, LSM-LSM di Indonesia yang didanai oleh lembaga dana asing selalu menyuarakan demokratisasi. Sejak dekade 1980-an muncul sebuah skema pendanaan dan akan fokus pada upaya-upaya mewujudkan suatu negara yang demokrasi. Sementara itu negara-negara di Dunia Ketiga percaya bahwa negara yang demokratis akan mudah mendapatkan mitra kerja ekonomi maupun politik (Widjajanto, 2007: 90-91).

Demokrasi yang dikumandangkan oleh lembaga dana asing tidak hanya sebatas pemilu yang bebas, jujur dan adil serta kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil. Tapi lebih dari itu, isu tentang demokratisasi merupakan langkah awal menuju liberalisme. Menurut Widjajanto (2007: 90), demokratisasi dilihat sebagai sebuah upaya penyebaran pengaruh ideologi liberal ke berbagai negara di dunia. Ditambahkan oleh Pontoh (2005: xvi), di Indonesia, perpindahan idologi politik diktator zaman Orde Baru ke zaman reformasi telah berubah arah, bukan lagi transisi menuju demokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme. Hal ini karena faktor internasional yang dominan seperti kekuatan modal asing semacam IMF,

*Word Bank*, dan perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat.

Kebebasan rakyat dengan hak suara yang dimiliki hanya dibutuhkan ketika pemulu saja. Selebihnya rakyat dikhianati, ditipu, kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat. Justru sebaliknya, kebijakan hanya diperuntukan untuk para penguasa dan para birokrat, yang ironisnya justru mereka dipilih oleh rakyat. Menurut Mulgan (Pontoh, 2005: viii), prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan, dan kompetisi telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berbisnis bagi pemilik modal, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan nasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas, yang kesemuanya adalah watak neoliberalisme.

Kekuatan politik yang bergabung dengan kekuatan modal telah menjadikan kuasa neoliberalisme tak terbandung. Sistem demokrasi saat ini hanya melayani kekuasaan oligarki. Penguasaan “si kaya” pada “si miskin” . Kekuasaan hanya berpindah-pindah pada segelintir elit oligarki itu-itu saja. Realasi antara kekuatan politik dan kekuatan modal dihidupkan oleh demokrasi prosedural. Demokrasi yang hanya sebatas penciptaan lembaga saja. Sistem demokrasi yang demikian justru menghasilkan keputusan-keputusan menganiaya rakyat, sebaliknya cukup menguntungkan kuasa neoliberalisme. Misalnya, proyek privatisasi telah menciptakan program pendidikan dan biaya kesehatan yang mahal. Tentu

itu sangat memberatkan rakyat, namun bagi pemilik modal justru menjadi lahan bisnis yang menarik dengan mendirikan rumah sakit serta lembaga pendidikan. Contoh lain adalah peraturan daerah pada sistem tata kota, setiap pedagang kaki lima dan perumahan kumuh digusur karena dianggap sebagai biang utama masalah perkotaan. Lebih pilunya lagi lembaga hukum hanya berberan sebagai alat penyeleksi dengan mencantumkannya sebagai larangan. Sementara tempat tersebut kemudian dibangun gedung-gedung mewah seperti perkantoran, mall-mall dan perumahan serta apartement-apartement elite (Pontoh, 2005: 169).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa melalui aturan, regulasi serta kelonggaran negara yang dibuat untuk memudahkan para pebisnis dan pemilik modal untuk berbisnis adalah prinsip dasar yang semakin memuluskan laju neolebralisme. Menurut nabinya para neoliberal Friedrich August von Hayek (Pontoh, 2005: 22), peran negara bukan untuk mengintervensi *spontaneous order* yang muncul dalam pasar, sebaliknya peran negara justru melindungi *spontaneous order* tersebut dari intervensi manusia baik itu politisi, kelompok-kelompok kepentingan seperti serikat buruh. Konsekuensinya, bila menganut prespektif Weberian (“pasar” dan “negara”) jika ingin kekuatan pasar bekerja harus diupayakan agar negara semakin melemah dan hanya berfungsi sebagai legulator, karena pengaturan negara bertentangan dengan konsep noelibelalisme.

Dampak dari tumbuhnya neoliberalisme ini adalah menjamurnya perusahaan-perusahaan berbasisi multinasional di dunia. Merurut Wibowo

(2004: 3), salah satu faktor munculnya neoliberalisme adalah kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai kekuatan besar yang rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Australia.

Pertanyaannya, apakah benar neoliberalisme memang membawa kemakmuran? Jawabannya tidak. Dengan janji-janji para kapitalis bahwa dengan paham neoliberalisme akan membawa kemakmuran global lebih cepat dari yang diinginkan, tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Neoliberalisme hanya menghasilkan ketimpangan-ketimpangan ekonomi. Hanya ada seperlima penduduk dunia yang menikmati hasil dari 80% pendapatan dunia. Sementara yang lain hidup dibawah kemiskinan. Dunia ini tidak menjadi lebih makmur apa lagi adil semata-mata karena kapitalisme yang menjelma menjadi neoliberalisme (Wibowo & Wahono, 2004: 3).

Karena itu ditegaskan Hancock (2007:357):

“Sangatlah mungkin bila bisnis bantuan pembangunan negara-negara barat itu merupakan penghalang nyata bagi usaha-usaha masyarakat miskin untuk lebih produktif. Bisnis bantuan pembangunan tersebut juga merupakan sebuah pengingkaran potensi rakyat miskin dan merupakan sebuah penghinaan (lewat pendiktean) negara-negara kaya terhadap keunikan dan kemampuan negara miskin yang belum mereka sungguh-sungguh kenal”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian yang dimulai dari merumuskan masalah penelitian, pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, hingga pembahasan dengan beberapa teori kritik sosial. Penulis menemukan beberapa kesimpulan.

*Pertama*, proses pengajuan program kerja LSM. Pada dunia kerja LSM Indonesia khususnya di Yogyakarta ada beberapa cara lembaga donor dalam mengajukan program kerja, yaitu melalui pengumuman secara terbuka melalui media massa, sosialisasi terbatas, dan hubungan langsung. Namun cara yang relatif lebih sering digunakan dalam proses pengajuan program adalah dengan cara hubungan langsung. Hal ini karena atas dasar kedekatan LSM dengan lembaga donor.

*Kedua*, alasan dan pertimbangan lembaga donor dalam pemberian dana ke LSM. Ketika memberikan dana pada LSM, lembaga donor selaku pemilik dana memiliki beberapa pertimbangan serta alasan. Pertama, adalah kepercayaan. Kepercayaan dilandasi oleh kinerja dan reputasi LSM itu sendiri. Kapasitas dari LSM, baik itu kapasitas secara keorganisasian maupun kapasitas secara hukum. Terakhir adalah popularitas dari individu dari suatu LSM. Popularitas kerap dijadikan sebagai sandaran LSM untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor. Kedua, pertemanan dan rekomendasi. Sebagian dari lembaga donor sering meminta rekomendasi

dari beberapa LSM yang sudah mereka kenal untuk mencari LSM baru yang mampu menjalankan program kerja mereka. Begitu juga sebaliknya, LSM kecil atau baru sering memita direkomendasikan pada lembaga donor untuk mendapatkan dana dari lembaga donor.

*Ketiga*, proses penentuan isu. Dalam dunia kerja LSM, isu menjadi bagian dari permasalahan sendiri. Ada yang namanya isu utama yaitu isu yang menyangkut kerja LSM secara keseluruhan didalam suatu wilayah bahkan negara tertentu. Isu-isu dalam kerja LSM mengenal *trend*, jadi pada setiap masa, isu-isu tersebut bisa berubah. Misalnya, pada zaman orde baru, isu utamanya adalah terkait masalah pembangunan atau istilah lainnya modernisasi. Namun kini telah berubah, kini isu utama dari dunia kerja LSM adalah demokratisasi. Selain itu isu-isu tersebut juga bisa berubah sewaktu-waktu bila ada kejadian tak terduga, seperti bencana alam. Dalam proses menentukan isu, ada beberapa cara yang dilakukan baik dari lembaga donor maupun LSM, yaitu pertama, lembaga donor mewacanakan isu, ini adalah hal yang paling lazim terjadi. Kedua, LSM mewacanakan atau menentukan isu. Hal ini biasanya tergantung kondisi masyarakat sekitar LSM tersebut. Ketiga, lembaga donor mengarahkan atau mendikte isu yang di kerjakan oleh LSM. Keempat, atau yang terakhir adalah kejadian tak terduga, seperti bencana alam.

*Keempat*, proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau yang sering disebut dengan monev adalah alat untuk mengukur efektifitas kerja LSM dalam menjalankan program kerjanya. Ada dua hal

pokok yang dimonitoring dan evaluasi yaitu administrasi, keuangan dan hasil. Tapi biasanya kebanyakan lembaga donor akan lebih fokus dalam monev keuangan saja. Hanya sedikit dari lembaga donor yang fokus pada monev hasil. Sementara ada beberapa metode dalam melakukan monev di dunia kerja LSM, yakni, lembaga donor secara langsung melakukan monev kerja LSM, LSM sendiri melakukan pengawasan atas kerja mereka, terakhir adalah monev secara independen, namun monev independen biasanya ditentukan dan gaji oleh lembaga donor.

*Kelima*, relasi atau hubungan antara LSM. hubungan yang terjadi antar sesama LSM ternyata cukup kompleks. Misalnya saja hubungan yang terjadi antara LSM senior/lama dan LSM junior/baru. Ketika mencari dana untuk program kerja biasanya LSM kecil akan sulit berhubungan dengan lembaga donor, entah itu karena persyaratan keorganisasian yang kurang, ataupun karena belum dikenal oleh lembaga donor. Maka cara yang sering dipakai oleh LSM kecil adalah dengan cara menginduk atau dalam istilah lainnya berkolaborasi dengan LSM besar. LSM kecil akan bergabung dengan LSM yang sudah senior dalam meminta dukungan dana dari lembaga donor. Namun biasanya uang yang didapat relatif kecil bila dibandingkan dengan LSM senior.

Berbeda lagi halnya yang terjadi pada hubungan antar LSM besar. Karena ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor, memicu terjadinya situasi yang kompotitif antar LSM. Sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama LSM. untuk

mengatasi persaingan itu, maka sebagian LSM besar melakukan kanalisasi dana. Kanalisasi dana dapat juga diartikan penumpukan dana atau penggelembungan dana. Banyak dari LSM tidak mau berbagi program kerja maupun dana dengan LSM lain. Keserakahan sebagian LSM tersebut mengakibatkan LSM lain sulit untuk berkembang. Ada beberapa jenis kanalisasi dana, yakni kanalisasi isu, kanalisasi berkelompok dan kanalisasi geografis.

Dari hasil temuan penelitian diatas, penulis berusaha melakukan refleksi terhadap beberapa teori-teori sosial yang relevan. Hasil renungan teotitik atas temuan tersebut adalah:

*Pertama*, lembaga donor melalui pewacanaan isu, bertindak lebih superior dan sangat dominan. Melalui pengetahuan tentang isu, lembaga donor menebar kuasanya pada LSM. Sementara LSM dengan pengetahuan yang tidak berimbang dengan lembaga donor, hanya akan berusaha mencocokkan tanpa ada pertanyaan yang kritis.

*Kedua*, relasi kuasa yang terjadi antara lembaga donor dan LSM adalah penyebaran isu demokratisasi. Ada relasi kuasa antara lembaga donor dengan kekuatan dananya dan LSM dengan program yang dijalankannya. Pengetahuan lembaga donor tentang idiologi demokrasi dijadikan alat untuk menggelar kuasa-kuasa pada masyarakat sipil. Sementara LSM dengan pengetahuan yang sangat timpang, hanya menjadi perpanjangan tangan dari lembaga donor untuk menyebarkan isu

demokratisasi melalui pencocokan-pencocokan kegiatan yang mereka jalankan.

*Ketiga*, melalui praktik *panopticon*, monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai alat pendisiplinan kerja LSM. Agar kerja LSM dapat dinormalisasikan serta dikontrol, maka lembaga donor menerapkan praktik *panopticon*. Dengan monitoring dan evaluasi, para pekerja LSM akan diawasi, dinilai, dan dikontrol oleh lembaga donor. Kemudian secara bertahap pekerja LSM akan mengawasi perilaku mereka sendiri. hal ini dapat dilihat bagaimana monev internal dari LSM melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari diri mereka sendiri. Melalui kontrol semua orang atas semua orang tersebutlah menjadikan wacana kuasa menjadi tak terbandung. Sehingga praktik *panopticon* atas kerja LSM dijadikan sebagai alat pendisiplinan agar kerja LSM dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan keinginan dari lembaga donor.

*Keempat*, kritik atas CSR. CRS perusahaan tidak hanya sebatas tindakan *filantropis* semata. Kini CSR sudah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan kapitalis. Masuknya uang CSR dari perusahaan ke lembaga donor yang kemudian disalurkan ke LSM adalah upaya pelanggengan kekuasaan neoliberalis. Lembaga donor dengan mewacanakan isu demokratisasi yang kegiatannya di jalankan oleh LSM, merupakan upaya penyebaran idiologi neoliberalisme, karena demokratisasi adalah roda idiologis yang menggerakkan kapitalisme, moderenisme dan matrealime.

*Kelima*, melalui bantuan lembaga donor ke LSM terjadi praktik neokolonialisme. Kini penguasaan dari suatu negara atas negara lain tidak lagi hadir dalam bentuk kekerasan atau tindakan impresif namun dengan cara yang lebih halus, implisit, rumit dan sangat susah untuk dimengerti oleh orang awam. Salah satu caranya melalui lembaga bantuan. Dengan kedok bantuan pada masyarakat negara miskin, negara Dunia Pertama berusaha menguasai dan menjajah Dunia Ketiga agar tunduk dan patuh pada ideologi mereka. Kolonialisme kini berjalan melalui penguasaan atas aset di suatu negara.

Dari lima hasil renungan teoritik diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga donor adalah lembaga yang dominan, sementara LSM adalah lembaga yang berada pada posisi sub-ordinat. Ini terlihat jelas dalam beberapa hal. *Pertama* pewacanaan isu, lembaga donor sangat dominan dalam penentuan isu, sementara LSM hanya berusaha untuk mencocokkan saja. *Kedua*, persetujuan dalam program dan pendanaan, lembaga donor memegang peran penting dalam menyetujui suatu program kerja dan pendanaan. *Ketiga*, dari segi monitoring dan evaluasi, lembaga donor memanfaatkan monitoring dan evaluasi sebagai pendisiplinan kerja LSM agar kerja LSM sesuai dengan tujuan mereka. Namun LSM sebagai lembaga subordinat juga mempunyai strategi kuasa, walaupun kuasa yang dimiliki agak terbatas dan hanya LSM besar saja yang mampu untuk melakukannya.

## **B. Saran**

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah kurangnya data yang diambil pada segi dokumen-dokumen kinerja LSM, seperti proposal pengajuan dana dan program, serta tidak semua aktivis LSM di Yogyakarta dapat di wawancara. Terlebih tidak adanya narasumber dari lembaga donor dalam penelitian ini hingga menyebabkan data yang diambil tidak berimbang. Selain itu, objek kajian dari penelitian ini hanya terbatas untuk LSM di Yogyakarta.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bisa dilakukan adalah melakukan pengambilan data dari dokumen-dokumen kinerja LSM, serta melakukan wawancara dengan lembaga donor agar data yang diperoleh berimbang. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya yang merasa mampu dan mempunyai waktu yang cukup, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek kajian LSM seluruh Indonesia.

## Daftar Pustaka

1. Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility: Menjinakan Gejolak Sosial di Era pornoografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Bertens, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gremedia Pusta Utama.
3. Widjaja, Gunawan & Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
4. Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
5. Santoso, Listiyono, dkk. 2007. *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
6. Widjajanto, Andi. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Nusantara Yogyakarta.
7. Jorgensen, Marianne W, Louse J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana: Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
8. Editor, Jordan, Lisa, Tuijl Peter Van. 2009. *Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip & Inovasi*. Jakarta: LP3ES.
9. Moleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
10. Audifax. 2008. *Research: Sebuah Pengantar untuk Mencari-Ulang Metode Penelitian dalam Psikologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
11. Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

12. Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press
13. Branen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
14. Wahyudi, Isa & Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
15. Triwibowo, Darmawan, Editor. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokrasi*. Jakarta: LP3ES
16. Sorros, Gorge. 2007. *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Jakarta: Obor Indonesia
17. Pontoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book
18. Wibowo, I & Francis Wahono. 2003. *Noelibralisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas
19. Sarup, Madan. 2011. *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodrenisme*. Yogyakarta: Jalasutra
20. Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya
21. Fakhri, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM*. Yogyakarta: Insist Press
22. Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press

23. Said, Edward W. 2010. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
24. Saksono, Ign. Gatut. 2009. *Noelibralisme vs Sosialisme: Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Forkoma PMKRI
25. Hancock, Graham. 2007. *Dewa-Dewa Pencipta Kemiskinan: Kekuasaan, Pretise, dan Korupsi Bisnis Bantuan Internasional*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas
26. —————2003. *Direktori Peacebuilding Indonesia: Indonesian Peacebulding*. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atmajaya

### **Skripsi**

1. Anissa, Firi. 03/ 171813/ 20442. 2007. *Otonomi LSM Terhadap Donatur: Kasus Pada LSM Rifka Annisa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
2. Setyarini, Dyah Wulandari. 96/ 108107/ SP/ 17268. 2003. *Public Relations dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Kasus Peran Public Relation Dalam pelaksanaa Community Development sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Taman Safari Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
3. Sholikhati, Irma Nurus (06331026). 2010. *Implementasi Program corporate social Ressposibility (CSR) PT PLN (PERSERO) Area*

*Pelayannan dan Jaringan (APJ) Cirebon Distribusi Jawa Barat dan Banten. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.*

4. Megayanti, Nita (04331028). 2009. *Pengaruh program Corporate Social Resposibility (CSR) dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan PT. Telkom Kandel Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.*

### **Online**

Vivanews.com

duniaartikelartikel.blogspot.com

Kompas. Com

Aji. org

Rifkaanissa. or. id

Combaine. org

Fordfoundation. Com

Ciptamedia. org

Compasiana.com

gsbi.blogspot.com



# LAMPIRAN

